

LAMPUNG SAI

VOLUME 2 2022

Arahan Wamenkumham: Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas

Penguatan pada Jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung



Penguatan Reformasi Birokrasi

Oleh Staf Ahli Menkumham Iwan Kurniawan

74 CPNS Siap Mengabdikan

Kakanwil Kemenkumham Lampung :
Selalu bersyukur dan Tanamkan *Mindset*
Bangga Melayani Bangsa



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Dari Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Pada Volume II Tahun 2022 ini kami sajikan liputan khusus kunjungan kerja Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward O.S. Hiariej di selama di Lampung. Terangkum juga kegiatan penting lainnya baik yang ada di kantor wilayah maupun satuan kerja.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar E-Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!



Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | **Pelindung:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas RB & TI | **Tim Redaksi dan Redaktur Foto :** Damba Wiratama, Reza Khairulfitra, Pijar P. Arinda, Rizqi D. Wardhanik, Nabil An Nafis, Odi Dewangga Y. | **Desain Grafis dan Layout:** Nabil An Nafis

Daftar Isi



Liputan Khusus



09

Kunjungan Kerja
Wamenkumham RI di
Provinsi Lampung



18

Sekjen: Berikan Pengabdian
Terbaik! Pembukaan Orientasi
CPNS Kemenkumham secara
Serentak



34

Syukuran HBP Ke 58, Dirjen
Pemasarakatan: Omset dari
One Day One Prison's Product 3
Milyar Lebih!



44

Kekayaan Intelektual Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi! Tegas
Menkumham Yasonna



69

Penguatan Reformasi Birokrasi
oleh Staf Ahli Menkumham Iwan
Kurniawan



78

Evaluasi TPI Dalam Pembangunan
Zona Integritas di Jaringan Kanwil
Kemenkumham Lampung



86

Penyelenggaraan SKD Calon
Taruna Poltekip/Poltekim TA.
2022

16

Raut Bahagia Para CPNS Terpancar Saat Kakanwil Kumham Lampung Serahkan SK Secara Simbolis



26

Saat Yasonna Menyerap Suara Anak Muda, Dorong Kemajuan Kreativitas



28

Wagub Lampung Terima Penghargaan atas Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dari Menkumham

30

Perdana, IPKEMINDO Lampung Gelar Lomba Public Speaking antar Pembimbing Kemasyarakatan

32

Perlindungan Hak Cipta dan Manfaat Aplikasi POP-HC", Kanwil Kemenkumham Lampung Kembali Gelar Dialog Eksklusif

36

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 58, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Upacara dan Tabur Bunga



38

Monev Lapas Kalianda, Kemenkumham Lampung Salurkan Bantuan kepada UMKM Sekaligus Resmikan Ruang Pelayanan Publik

41

Sangat Mudah! Kadivyanakum Ajak Masyarakat Kenali Perseroan Perorangan dan Syarat Pendirianya

43

Sambut Hari KI Sedunia Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Inventarisasi KIK di Kabupaten Tulang Bawang



46

Monev UPT Pemasyarakatan se-Kota Metro, Kakanwil: Deteksi dini, Berantas Narkoba, Maksimalkan Pelayanan bagi Masyarakat dan WBP

48

Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Yankomas Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Klarifikasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji

50

Rayakan Hari Kemenangan, 4.976 Warga Binaan Lapas, Rutan, & LPKA Wilayah Lampung Dapatkan Remisi Khusus Idulfitri 1443 H



52

Halal Bihalal 1 Syawal 1443 Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM", Menkumham: Setelah Kita Saling Bermaafan, Saatnya Kita Kembali Fokus Bekerja

54

Jalin Sinergitas Bersama Media, Kakanwil Ingin Kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung Dapat Dipantau Masyarakat

56

Audiensi Gubernur Lampung, Kakanwil Bahas Lapas/ Rutan/Kanim Hingga Kabupaten/ Kota Peduli HAM



Kabar Satker



Pengayoman 1

60

Kobarkan Semangat Back To Basic, Kadiv Pemasarakatan Kembali Himbau Jajaran Untuk Fokus Berantas Narkoba

62

22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi Laksanakan Penandatanganan Perubahan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022

64

Kakanwil Edi Kurniadi Buka Secara Resmi Sosialisasi Layanan AHU Tentang Perseroan Perorangan

66

Dukung Penegakan Supremasi Hukum, Kakanwil Kemenkumham Lampung Resmi Buka Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum

68

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual , Tim Pelayanan KI Sambangi Pusat Perbelanjaan di Bandar Lampung

72

Resmi Buka Rakor Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah, Kakanwil Kemenkumham Lampung Harapkan Penerapan PMPJ Notaris yang Lebih Efektif

74

Cerdas Hukum Sejak Dini, Kanwil Kemenkumham Lampung Ajak Siswa Siswi MTSN 2 Bandar Lampung Terapkan Anti Narkoba dan Anti Bullying

76

Wujudkan Anggaran yang Mengacu Pada Indikator Kerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja, Kanwil Kumham Lampung Gelar Penyusunan Pagu Indikatif TA 2023

83

Tindak lanjut Penyampaian Aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan



95

Tetap Berkreasi Meski di Balik Jeruji Besi



100

Daftarkan Produkmu pada Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham



Kamu Harus Tahu



07/07



Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI, Edward Omar Sharif Hiariej melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Sejumlah Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi menjadi tujuan dalam lawatan Wamenkumham kali ini. Kunjungan kerja diawali dengan meninjau Sarana dan Prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung (Rajabasa). Ikut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi beserta para Pimpinan Tinggi Pratama.



Kunjungan Kerja Wamenkumham



Wamenkumham mencoba roti hasil bimbingan kerja warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung

Setiba di Lapas Rajabasa, Wamenkumham disambut dengan pengalungan kain tapis khas Lampung dan Yel-yel oleh sejumlah pegawai. Kunjungan dimulai dengan meninjau Ruang Pelayanan Lapas Rajabasa didampingi Kepala Lapas (Kalapas) Rajabasa, Maizar sekaligus menjelaskan berbagai layanan yang disediakan dan perubahan positif yang telah dilakukan.

Dalam area bengkel kerja, Wamenkumham meninjau berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang berada di Lapas Rajabasa. Salah satu yang menarik perhatian adalah Produk Roti.

Selain bengkel kerja, Wamenkumham juga meninjau poliklinik, dapur, galeri seni, hingga ke blok hunian WBP Lapas Rajabasa. Kepala Lapas Rajabasa, Maizar men-

”

Terus kembangkan potensi-potensi WBP yang memiliki keahlian dan keterampilan, pembinaan kemandirian ini akan bermanfaat untuk bekal mereka saat sudah diluar nanti

ucap Edward

Kalapas I Bandar Lampung, Maizar (kanan) saat mendampingi kunjungan Wamenkumham



gungkapkan rasa terima kasih kepada Wamenkumham yang berkenan hadir di Lapas Rajabasa.

"Semoga dengan kedatangan Bapak lebih memberikan semangat dan spirit bagi jajaran Lapas Rajabasa untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi," ucap Maizar

Tinjau Sarpras Rutan Kelas I Bandar Lampung

Wamenkumham bersama kakanwil melakukan tinjauan langsung sarana dan prasarana Rutan Kelas I Bandar Lampung. Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung bersama jajaran memastikan bahwa sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak.

"Kondisi sarana dan prasarana terbilang baik, makanan dan fasilitas dapur juga sangat layak." Ujar Wamenkumham dalam tinjauannya.

Sebelum bertolak ke Rup-basan Kelas I Bandar Lampung, Kunjungan kerja ini diakhiri dengan tinjauan langsung Wamenkumham pada blok-blok hunian warga binaan di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, Wamenkumham menyapa dan juga memberikan motivasi kepada warga binaan untuk kembali berprilaku baik.

Tinjau Kegiatan Pembinaan Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Dalam kunjungannya, Wamenkumham memantau sejumlah kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung diantaranya Kegiatan Pembinaan Rohani dan Kegiat-



▲ Wamenkumham meninjau kegiatan pembinaan Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung



▲ Wamenkumham meninjau sarana dan prasarana Rutan Kelas I Bandar Lampung

tan Pelatihan Kemandirian. Wamenkumham juga mengapresiasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung atas kegiatan pembinaan yang berjalan dengan tertib.

"Ya saya kira suasananya tertib, teratur dan bisa optimal dalam melaksanakan pembinaan di Lapas." ungkap Wamenkumham usai meninjau kegiatan warga binaan.

Terkait pembinaan kerohanian, Wamenkumham juga mengapresiasi pelatihan manasik haji yang dapat menumbuhkan nilai keagamaan warga binaan. "Jika nilai agama tumbuh, maka untuk mengulangi perbuatan tindak pidana itu akan semakin kecil. Saya berharap mudah-mudahan Lapas Narkotika bisa segera meraih predikat WBK." Imbuhnya.

Kunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI diawali dengan pemberian Selendang tapis dan disambut dengan Tarian Sembah tarian yang dilakukan pada saat kedatangan Tamu di suatu tempat.

Kunjungan Wamenkumham didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Edi Kurniadi, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Para Pejabat Struktural, JFT dan JFU di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung.

Saat kunjungan di LPP Kelas IIA Lampung, pria yang akrab disapa Eddy itu menyampaikan apresiasinya terhadap LPP Kelas IIA Lampung dalam proses pembinaan WBP. Kondisi Lapas yang terlihat baik membuatnya kagum saat melakukan kunjungan. Dalam kunjungannya ia pun juga menyalami, melakukan peninjauan proses pembinaan WBP di ruang bimbingan kerja dan berdialog dengan WBP dalam blok Hunian tentang kondisi dan pemenuhan hak yang diberikan oleh petugas Lapas.

”

Saya mengapresiasi pelayanan petugas keimigrasian yang cukup baik kepada masyarakat hingga mendapatkan komentar positif dari masyarakat, semoga kinerja yang baik ini terus ditingkatkan

ucap Edward



Wamenkumham apresiasi pelayanan Publik Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung

Apresiasi Pelayanan Keimigrasian

disambut hangat oleh Plt. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, R.A. Fatimah berserta jajaran. Pada kesempatan ini Wamenkumham meninjau sarana dan prasarana pelayanan Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung dan memastikan seluruh sarana prasarana dalam keadaan baik.

Wamenkumham juga menyapa beberapa pengunjung yang

datang untuk membuat paspor dan menyelesaikan administrasi keimigrasian. Beberapa pengunjung menyampaikan bahwa pelayanan Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung sangat baik dan petugasnya juga sangat ramah.

Penguatan pada jajaran Kantor Wilayah

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy OS Hiariej Kunjungi Lampung pada Ka-



mis (07/07/2022), kedatangan Wamenkumham ini disambut langsung oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kunjungan kerja Wamenkumham di Provinsi Lampung ini dalam rangka Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pada Jajaran Kantor Wilayah Kementeriankumham Lampung serta meninjau UPT Keimigrasian dan Pemasarakatan di Provinsi Lampung.

Sebelum memberikan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pada jajaran Kantor



”

Tahun 2021 sebanyak dua satuan kerja meraih predikat WBK. Pada tahun 2022 dengan semangat baru seluruh satuan kerja mencanangkan ZI dengan 15 satuan kerja telah diusulkan dalam Desk Evaluasi Tim Penilai Internal

kata Edi

Wilayah Lampung, Wamenkumham beserta rombongan telah melakukan kunjungan ke beberapa Unit Pelaksana Teknis baik Pemasarakatan maupun Imigrasi. Satuan Kerja yang dikunjungi menyambut kedatangan Wa-

menkumham dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Kunjungan Pertama dilakukan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, dilanjutkan menuju Lapas Narkotika kelas IIA Bandar Lampung, Rutan kelas 1 Bandar Lampung, Rupas kelas 1 Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung.

Berlanjut mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Wamenkumham berikan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi pada jajaran Kantor Wilayah Lampung yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Kegiatan Penguatan dihadiri Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Lampung, Para Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pegawai Kantor Wilayah Lampung.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi. Dalam Sambutannya Edi Kurniadi mengucapkan Selamat datang Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM RI di Provinsi Lampung, Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai Gerbang Pulau Sumatera.

Edi Kurniadi juga menyampaikan progres pembangunan zona integritas di Lampung.

Dalam Sambutan Wamenkumham, Pria yang akrab disapa Prof Eddy memberikan 3 kata kunci dalam mewujudkan Zona Integritas. •

”

Ketika kita berbicara mengenai Zona Integritas, ada tiga kata kunci yang harus kita pegang bersama, harus kita hayati dan harus kita amalkan. Yang pertama dan utama adalah Integritas itu sendiri, yang kedua adalah transparansi dan yang ketiga ialah akuntabilitas. Di dalam integritas itu ada tiga hal yaitu kejujuran, kedisiplinan dan etika kita dalam melaksanakan tugas.

ucap Prof Eddy





Raut Bahagia Para CPNS Terpancar Saat Kakanwil Kumham Lampung Serahkan SK Secara Simbolis

01/04



Perwakilan CPNS menerima langsung penyerahan SK CPNS secara simbolis oleh Kakanwil

Para Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia hari ini serempak menerima SK CPNS sebagai awal melaksanakan tugas dan bergabung dengan keluarga besar Pengayoman. Hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi; didampingi Kepala Divisi Pemas-yarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; dan Kepala Divisi Pelayanan Hu-

kum dan HAM, Alpius Sarumaha untuk menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan CPNS di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Jumat (01/04).

Dalam arahnya, Edi Kurniadi mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah lulus seleksi oleh Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia. "Kita patut bersyukur dan bangga sistem

penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan secara Transparan, berbasis Teknologi Informasi dan Akuntabel serta Bebas dari Nepotisme.

Hal ini sebagai pondasi penerimaan berkerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi juga mengingatkan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil untuk selalu menjaga



◀ Kakanwil Edi saat memberikan arahan kepada para CPNS

”

*Selalu bersyukur dan
Tanamkan Mindset
Bangga Melayani Bangsa*

ujar Edi

nama baik marwah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nantinya terhitung mulai tanggal 4 April sampai dengan 14 April 2022 akan dilakukan orientasi CPNS.

Perlu diketahui, CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 di Provinsi Lampung menerima 74 orang dengan spesifikasi pendidikan Strata-1 dan SLTA yang nantinya akan ditempatkan di Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja sesuai formasi yang dibutuhkan.

Arahan Kakanwil

Setelah melaksanakan Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, Jum'at (01/04/2022) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Edi Kurniadi memberikan sedikit pem-

bakalan dan arahan terkait dengan kiat-kiat serta tugas pokok dan fungsi pada 74 CPNS TA. 2021.

Kepala Bagian Umum, Hadiyanto memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menyampaikan bahwa di Tahun 2021 sebanyak 74 CPNS di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung telah diterima yang masuk sebagai formasi antara lain: Penjaga Tahanan, Tenaga Kesehatan, Analis Keimigrasian, dan lainnya. Tak lupa Hadiyanto juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Orientasi CPNS akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 6 April 2022 di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Selanjutnya memberikan arahan, Edi Kurniadi memperkenalkan para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung antara

lain Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha.

Dalam penyampaiannya, Edi Kurniadi berpesan agar seluruh Pegawai CPNS TA. 2021 bersikap tidak sombong dan rendah diri. Hal ini juga bertujuan agar CPNS TA. 2021 dapat menjadi kebanggaan serta selalu menjaga martabat dan marwah Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Selalu bersyukur dan Ciptakan mindset Bangsa Melayani Bangsa” Ucap Edi.

Mempertegas arahannya, terutama pada sektor penjaga tahanan, Edi menegaskan bahwa Petugas Pemasarakatan harus memiliki integritas yang tinggi, “dengan Lingkungan Kerja di lapas maupun rutan, saya berharap anak-anak sekalian tidak tergiur dengan segala bentuk pelanggaran seperti pungli, gratifikasi apalagi penyalahgunaan narkoba” Ujar Edi. •



SEKJEN: BERIKAN PENGABDIAN TERBAIK!

Pembukaan Orientasi CPNS
Kemenkumham secara Serentak

04/04





Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Pembukaan Orientasi CPNS Kemenkumham secara virtual melalui Zoom Meeting. Pembukaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto



▲
Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budi Revianto secara resmi membuka orientasi CPNS TA. 2021

Mengawali sambutannya, Andap mengucapkan selamat kepada CPNS Tahun 2021 karena telah berhasil masuk menjadi bagian dari Kemenkumham. "Dari 627.113 pendaftar hanya 4.558 orang yang diterima atau hanya 0,73% saja" kata Andap.

Andap menekankan jika seleksi CPNS Kemenkumham telah dilaksanakan secara jujur, bersih, transparan dan humanis.

Melanjutkan arahnya terkait Covid-19, Andap besan agar senantiasa menjaga kesehatan dengan hidup sehat dan disiplin menerapkan prokes serta senantiasa produktif dalam bekerja.

"Saya berharap jaga Kesehatan dengan baik, Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan berarti," tutur Andap. Menjelaskan Kwadran Pro-

duktifitas, Andap menegaskan agar pekerjaan dikerjakan secara teamwork dan sistem (arahan tugas yang jelas) sehingga pekerjaan menjadi ringan dan tertata serta menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Selanjutnya Andap berharap seluruh CPNS dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan mengambil

Mengutip pesan John F. Kennedy "Jangan Tanyakan Apa yang Negara Berikan Kepadamu Tapi Tanyakan Apa yang Kamu Berikan Kepada Negaramu." Andap mengajak Tunas Pengayoman Tahun 2021 ini untuk berkontribusi bagi kemenkumham. "Berikan pengabdian yang terbaik, kehadiran rekan-rekan harapannya dapat menjadi pembeda dan memberikan kemajuan bagi Kemenkumham kearah yang lebih positif." pungkask Andap

”

Jadilah pemimpin yang dapat mencontohkan, lead by example. Harus berbeda dari yang lain, lebih disiplin dan lebih sigap. Ambil pelajaran dan pengalaman dari para senior agar dapat melaksanakan pengabdian sebagai insan Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI

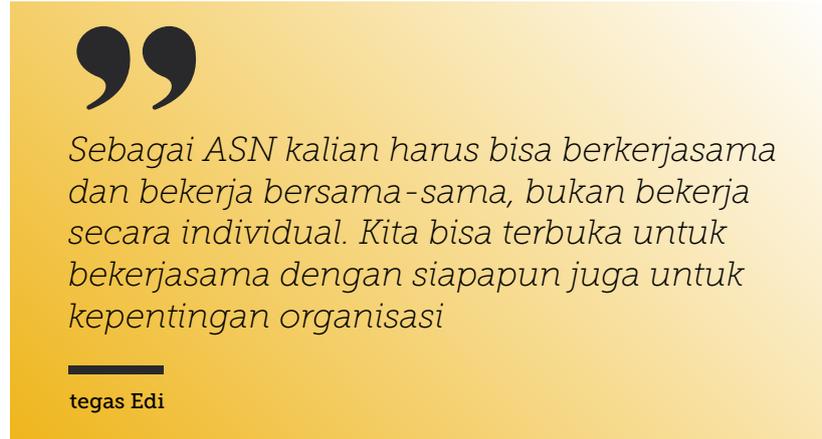
—
tukas Andap

Melayani Bukan Dilayani

Hari Kedua, CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung terima penguatan core values ASN Berakhlak pada Orientasi Selasa (5/4/2020). Penguatan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi kurniadi. ASN Berakhlak merupakan Core Values ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021.

Mengawali arahan Edi memberi ucapan selamat kepada CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung. "Kalian adalah terbaik diantara yang terbaik, mudah-mudahan niat kalian untuk menjadi CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung saat ini sudah bulat," ucap Edi.

Menegaskan kembali jika ASN adalah pelayan masyarakat,



Edi berpesan jika ASN harus melayani bukan dilayani. "Kita wajib melayanai, kita adalah pelayan masyarakat, masyarakat yang butuh bantuan Kementerian Hukum dan HAM, baik pelayanan hukum maupun pelayanan lainnya."

Pada core value Kolaboratif. Edi berpesan jika ASN harus dapat membangun kerja sama yang sin-

ergis. CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung yang didominasi oleh formasi Penjaga Tahanan Edi tak luput memberikan nasehat sebagai Petugas Pemasarakatan. "Ingat tugas kalian sebagai penjaga tahanan adalah membina manusia dan memanusiakan manusia. Kita menghadapi makhluk hidup yang memiliki hak dasar seperti kita," ujar Edi.



▲ Kakanwil Edi Kurniadi saat memberikan arahan kepada para CPNS di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung

Intermezo sejenak, sosok penggemar kopi pahit inipun menyampaikan filosofi yang terkandung dalam kegemarannya tersebut. "Ibarat hidup, kalau kita sudah terbiasa dengan pahit lalu mendapat yang manis maka akan terasa lebih nikmat. Jika yang didapat pahit kitapun masih bisa menikmati. Jadi kita dapat sanantiasa untuk bersyukur," tandas Edi

Menutup arahan, Edi berpesan kepada CPNS agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. "Jadikanlah tugas kalian sebagai Aparatur Sipil Negara dengan penuh tanggung jawab sekaligus sebagai sarana melaksanakan ibadah dan jaga selalu nama baik instansi," pungkask Edi.

Pedoman Tata Nilai "PASTI"

Selasa (05/04), Usai pembekalan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, CPNS Kanwil Ke-



kumham Lampung Tahun 2021 terima penguatan mengenai Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan.

Dalam paparannya, Topan menjelaskan Pembangunan Hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Hukum Nasional. Sebagai faktor pemersatu bangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pembangunan Hukum secara komprehensif meliputi, Substansi hukum, Struktur Hukum / Kelembagaan Hukum dan Budaya Hukum.

"Pembangunan Hukum Nasional harus dibarengi dengan Penegakan Hukum secara tegas, konsisten, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia" tutur Topan.

Lebih lanjut, Topan memaparkan fungsi dan peran hukum dalam masyarakat dimana fungsi hukum sebagai pedoman kepada masyarakat, bagaimana berting-

dan bersikap serta peran hukum sebagai control sosial, penyelesaian sengketa/perselisihan dan alat rekayasa sosial.

Masuk ke materi selanjutnya, Topan memaparkan visi misi serta tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Topan menekankan akan pentingnya mempedomani Tata Nilai Pasti Kementerian Hukum dan HAM.

Selain paparan yang disampaikan, Topan juga menyoroti mengenai kedisiplinan para CPNS yang hadir dalam orientasi.

"Masih saya temukan CPNS yang tidak sesuai dengan tata berpakaian yang sudah ditentukan, hal ini harus menjadi perhatian untuk kedepannya. Ingat, disiplin diri itu kunci dari keberhasilan" tutup Topan

”

Selain visi dan misi, kalian harus menjunjung tinggi Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu PASTI; Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif sebagai pedoman dalam berkerja nantinya

ujar Topan

◀ Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan menekankan pentingnya kedisiplinan kepada para CPNS

”

Apabila kita berfikir, bekerja dengan mindset Money Oriented, maka godaan yang sodara/I dapatkan di Lapas maupun Rutan sangatlah besar

ujar Farid



Perwakilan CPNS memberikan laporan sebelum materi diberikan

Tanamkan Integritas CPNS

Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah memasuki hari kedua. Selasa (05/04/2022) di hari yang sama, sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi dan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan sudah memberikan pembekalan berupa materi-materi tugas dan fungsi kepada CPNS TA. 2021.

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dr. Farid Junaedi memberikan pembekalan terkait dengan Divisi Pemasyarakatan, namun sebelum memberikan materi, Dr. Farid membuka interaksi dengan para CPNS 2021 yang menanyakan “Apa alasan saudara bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM” tanya Dr. Farid.

Salah satu CPNS, dengan panggilan Putri menjelaskan bahwa Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM merupakan impian dan cita-cita sekaligus memperbaiki taraf kehidupannya, selain itu CPNS Pria yang juga ikut ditanyakan menjawab bahwa “saya tertarik ber-

gabung dengan Kementerian Hukum dan HAM salah satunya dikarenakan oleh Gaji maupun Tunjangan-nya” ucapnya namun demikian menurutnya selain dari segi pendapatan, hal seperti membanggakan orang tua serta ingin melayani masyarakat juga menjadi poin dari alasan bergabung di Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah mendengar beberapa alasan, Dr. Farid menyimpulkan bahwa sudah sewajarnya apabila kita yang bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki dan menanamkan Jiwa Integritas.

Selanjutnya, Dr. Farid memberikan materi dengan tema Peningkatan Integritas dan Pelayanan Publik yang Maksimal. Farid menjelaskan tentang 23 Satuan Kerja dibawah Divisi Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Maupun Rumah penyimpanan Barang dan Benda Sitaan Negara. Sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ada 3 Kunci Pemasyarakatan Maju Plus Back TO Basic yaitu Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Berantas Narkoba, Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, peduli Lingkungan Strategis, Pengawasan, Koordinasi.



◀ Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi saat memberikan materi terkait integritas kepada CPNS

Tebarkan Semangat dan Optimisme

Memberi materi tentang tugas dan fungsi keimigrasian, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto menjadi pemateri pamungkas pada orientasi CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung, Rabu (6/4/2022).

Is Edy menyambut dengan semangat peserta orientasi CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung serta mengucapkan selamat bergabung menjadi bagian dari Kemenkumham.

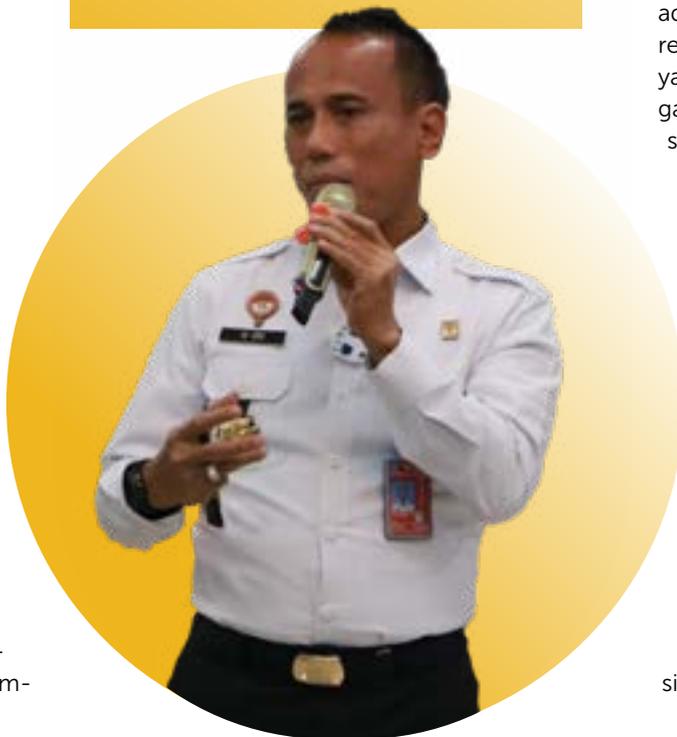
Mengawali dengan dasar hukum keimigrasian yaitu UU No.6 Tahun 2011, Is Edy menjelaskan jika keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Terdapat tiga Kantor Imigrasi di Provinsi Lam-

”

Temannya adalah pilihan yang terbaik. Jika sudah menjadi pilihan maka ada konsekuensi dan tanggung jawab dengan berkontribusi bagi Kemenkumham dan negara

tegas Is Edy



pung yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda. Lebih lanjut Is Edy menerangkan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Memberikan motivasi di akhir materi, Is Edy berpesan jika para CPNS ini adalah calon pemimpin selanjutnya di Kemenkumham. "Tidak ada yang tidak mungkin jika rekan-rekan ini kedepannya menjadi pimpinan di organisasi ini, caranya dengan senantiasa mengembangkan diri dan belajar setiap saat," pungkaskan Is Edy.

Ketahui Semua Pelayanan Kemenkumham

Memasuki hari ketiga orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung para



CPNS terlihat tampak bersemangat untuk menerima pembekalan, Rabu (06/04).

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha memberikan pembekalan terkait dengan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Sebelum memberikan materi, Dr. Alpius sedikit memberikan pengalamannya dalam berkarir sebagai motivasi kepada para CPNS.

Dalam paparannya, Dr. Alpius menyampaikan tugas dan fungsi Divisi pelayanan Hukum dan HAM. "Ada 3 Bidang yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yaitu Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum, dan Bidang HAM" jelas Dr. Alpius.

Dr. Alpius menjelaskan bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan HAM termasuk yang paling banyak terdapat pelayanan kepada masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.



"Sebagian besar pelayanan sudah bersifat online terhubung langsung ke Pusat sehingga Pelayanan di Kanwil Kemenkumham Lampung hanya berupa konsultasi maupun helpdesk" tutur Dr. Alpius.

Menutup pembekalan, Dr. Alpius berharap dengan pembekalan ini para CPNS minimal mengetahui apa saja Pelayanan Hukum dan HAM yang berada di Kanwil Kemenkumham Lampung. •

”

Kalian minimal harus mengetahui Pelayanan apa saja yang berada di bawah payung Kemenkumham, dengan pembekalan ini setidaknya kalian tidak keliru jika ada masyarakat yang bertanya

tegas Alpius





SAAT YASONNA MENYERAP SUARA ANAK MUDA

Dorong Kemajuan Kreativitas

21/06



Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berdiskusi dengan anak-anak muda di Kota Medan membahas pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Dalam acara Yasonna Mendengar dengan konsep town hall meeting itu, Yasonna banyak menyerap dan menjawab pertanyaan dari para pelaku industri kreatif serta startup secara lugas dan tidak berjarak.

Salah satu peserta yang bertanya adalah Rasyid, yang merupakan perwakilan dari Ikatan Muda-Mudi Melayu Indonesia. Dia meminta pendapat Yasonna mengenai usaha rintisannya di bidang jasa ekspedisi yang dirintis sejak enam bulan lalu.

"Sudah enam bulan saya mendirikan perusahaan pengiriman barang. Apakah sudah saatnya kami daftarkan, nama ekspedisinya City Ekspedisi," ucap Rasyid yang berusia 22 tahun tersebut.

"Oh, ya. Iya," jawab Yasonna dari lokasi acara di Andaliman Hall, Jalan Abdullah Lubis.

Yasonna lalu menyarankan Rasyid berdiskusi dengan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sumatra Utara mengenai tata cara dan pentingnya pendaftaran Perseoran Perorangan, pendaftaran merek, dan hal lain yang dapat membantu pengembangan perusahaan rintisannya.

”

Saya senang adik masih muda sudah mulai berusaha, jangan pantang menyerah, kendala pasti ada, berdiskusi untuk mendapat solusi

kata Yasonna

Peserta lainnya, Ririn Prabuwati, curhat mengenai kendala yang dia hadapi saat ingin mengurus legalitas pendirian badan hukum organisasinya yang berisi para pegiat seni pantomim. Organisasinya perlu berbadan hukum agar dapat menerima bantuan dana untuk operasional dan kegiatan pengembangan.

"Pak Menteri, saya mohon bantuan, kami mendapatkan masalah untuk dapat pengesahan itu harus melalui notaris, biayanya di Kemenkumham Rp200 ribu, tapi kalau sudah masuk ke notaris, mullailah muncul harga yang tidak sama, karena mahal dan kami tidak ada uang, kami hold dulu," ungkap Ririn.

"Bantulah kami komunitas untuk pengesahan badan hukum itu, dan kesamaan harga," sambungnya.

Menjawab itu, Yasonna meminta Divisi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kemenkumham Sumatra Utara memanggil satu notaris untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

"Panggil notaris, tetap ada biaya, tapi enggak semahal itu. Saya setuju bahwa para pemula harus kita dukung, sama kayak UMKM, keberpihakan kita harus disitu," ujar Yasonna.

Yasonna Mendengar merupakan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di daerah serta jemput bola menyosialisasikan pentingnya melindungi Kekayaan Intelektual. Dengan konsep town hall meeting, kegiatan Yasonna Mendengar jadi kental nuansa anak muda.

Kegiatan ini digelar perdana di Medan, Sumatra Utara. Provinsi ini menjadi pembuka karena tercatat menyumbang permohonan KI terbesar di Sumatera dan ke-6 dalam lingkup nasional. Selain di Medan, Yasonna Mendengar juga akan digelar di Jakarta, Denpasar, Surabaya, Solo, dan Makassar.

Dalam kegiatan ini, Yasonna berdiskusi lebih dekat dengan komunitas-komunitas penghasil Kekayaan Intelektual di Kota Medan dan Sumatera Utara. Hal ini juga dilakukan supaya Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bisa menghasilkan produk-produk hukum dan pelayanan publik yang efektif dan relevan.

Kegiatan ini melibatkan seratus peserta dari berbagai komunitas (musik, film, animasi, literasi, desain grafis, dan seni pertunjukan), termasuk dihadiri Wali Kota Medan Bobby Nasition.

Peserta lainnya menyaksikan melalui live streaming di Youtube serta Facebook dan Instagram DJKI. •

Wagub Lampung Terima Penghargaan atas Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dari Menkumham

13/04 



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha Menghadiri Kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia yang bertempat di Hotel JW. Marriot, Medan – Sumatera Utara. Rabu (13/04/2022) Turut hadir Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim dan seluruh pimpinan provinsi se-Sumatera dalam Kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual dengan tema Memacu Kreativitas dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Acara dimulai dengan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu menyampaikan bahwa kegiatan ini mer-

upakan bentuk penguatan pemahaman kekayaan intelektual sekaligus sebagai implementasi Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional.

Razilu berharap atas kegiatan rovin seminar KI ini dapat terjalin sinergi, kolaborasi dan dukungan untuk membangun era baru perekonomian daerah ber-



basis kekayaan intelektual dan mendorong lahirnya inovasi kreatifitas dari UMKM dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri.

Selanjutnya, Sambutan Selamat datang dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan terima kasih atas kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Sumatera Utara, harapannya seluruh masyarakat di Sumatera Utara mendapatkan hasil dari kegiatan ini dan juga bersama dengan bapak bupati dan walikota akan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan hak cipta kepada masyarakat yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Dilanjutkan dengan penayangan Video Indikasi Geografis dari Kekayaan Intelektual, dimana Provinsi Lampung memiliki komoditas lada hitam dari zaman kolonial terdahulu. Mendapatkan Penghargaan Pemerintah Provinsi atas Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan HAM memberikan Sertifikat Penghargaan kepada Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Dilanjutkan dengan Sesi Stadium General, Pemaparan Materi pertama terkait Peran Pemerintah Daerah dalam membangun Ekonomi wilayah berbasis Kekayaan Intelektual oleh Staf khusus Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Muchlis Hamdi menyampaikan bahwa manfaat HKI dalam pembangunan antara lain melindungi penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual sehingga mendapat perlindungan hukum, menciptakan citra yang positif, menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok.

”

Pemajuan Kekayaan Intelektual ini dapat sejalan dengan Tema G20 Tahun 2022 “Recover Together Recover Stronger” dan mewujudkan pemulihan ekonomi serta Kesehatan dunia yang inklusif

ucap Yasonna

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan sambutan sekaligus pemaparan materi tentang Bentuk Kekayaan Intelektual. Menyinggung Permasalahan Ekosistem Kekayaan Intelektual, “Ekosistem Kekayaan Intelektual merupakan siklus perputaran ekonomi, yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi” Jelas Menkumham.

Menutup sambutan dan pemaparannya, “Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreatasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya perlindungan Kekayaan intelektual kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong Peulihan Ekonomi Nasional” Ujar Yasonna.

Kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual pada sesi Stadium General ditutup dengan pemaparan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan tentang Kekayaan Intelektual Kunci Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Kreatif. •



◀ Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim terima Sertifikat Penghargaan kepada Wakil Gubernur Provinsi Lampung

Perdana, IPKEMINDO Lampung Gelar Lomba Public Speaking antar Pembimbing Kemasyarakatan

14/04



Bertempat di Hotel Grand Praba, Jelang peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-58 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Wilayah Lampung gelar lomba Public Speaking, Story Telling serta Performa dan Etika Persidangan antar Pembimbing Kemasyarakatan se-Lampung pada Kamis (14/04/2022).

Dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dr. Farid Junaedi; Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Bapas Bandar Lampung, M. Rolan; Kepala Bapas Kota Bumi, Welly; Kepala Bapas Metro, Sukir dan Kepala Bapas Pringsewu, Prayudha Rachmadani, jalannya kegiatan dipandu oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Elvi Suryaning-sih.

Mengusung Tema "PEMASYARAKATAN PASTI DAN BerAKHLAK, MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU", terdata 16 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan. Dewan juri yang dipimpin oleh Akademisi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Idawati Manurung ini beranggotakan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang, Hendri Irawan; Ketua IPKEMINDO Lampung, Yana Supriyana; Analis Hukum Muda,

I Made Agus Dwiana dan Tien Yulianti, Akademisi Universitas Teknokrat Indonesia.

Ketua IPKEMINDO Lampung sekaligus Ketua Panitia Kegiatan, Yana Supriyana melaporkan bahwa Perlombaan kali ini merupakan perlombaan pembimbing kemasyarakatan perdana di seluruh wilayah Indonesia. Selain sebagai rangkaian dari peringatan HBP, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mengasah kreativitas dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, "Maksudnya untuk memperkuat komitmen jajaran Pemasarakatan dalam berkinerja, meningkatkan motivasi, dan memacu inovasi dalam mencapai tujuan Sistem Pemasarakatan" tutur Yana.

Membuka jalannya kegiatan, Farid Junaedi Dalam sambutannya menyampaikan

pentingnya berkomunikasi dengan baik dan mampu beretika di masyarakat. Melalui perlombaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas public speaking Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah Lampung, sehingga meningkatkan kualitas hasil kinerja.

Farid juga Berpesan untuk berkompetisi dengan supportif diiringi hati yang gembira, tetap semangat meski sedang berpuasa di bulan Ramadhan.

Selain juara Individu, akan diberikan pula apresiasi juara umum bagi UPT yang mampu mendulang poin terbanyak dalam perlombaan. Pengumuman pemenang akan dirilis pada tanggal 27 April 2022 bersamaan dengan acara puncak Hari Bhakti Pemasarakatan Ke-58 Kanwil Kemenkumham Lampung. •

”

Public Speaking ini penting! karena menyangkut bagaimana kita bisa meyakinkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada hakim, dan kepada keluarga dari korban maupun keluarga tersangka agar mereka bisa percaya dan bercerita apa adanya dengan jujur dan nyaman.

ujar Farid



◀ Penyerahan cinderamata antara Kepala Divisi pemasarakatan, Farid Junaedi dengan Ketua Ipkemindo Lampung, Yana Supriyana

Perlindungan Hak Cipta dan Manfaat Aplikasi POP-HC”, Kanwil Kemenkumham Lampung Kembali Gelar Dialog Eksklusif

20/04 



Penyuluh Hukum Ahli Madya (tengah), Nurka Lingga Murti berikan penyuluhan POP-HC

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung kembali menggelar Dialog Eksklusif di Graha Pena, Radar TV Lampung dengan mengusung tema “Perlindungan Hak Cipta dan Manfaat Aplikasi POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)”. Rabu (20/04/2022)

Dengan menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yaitu Ade Arif Firmansyah selaku Ketua Sentra hak Kekayaan Intelektual LPPM

Universitas Lampung dan Nurka Lingga Murti selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Dalam Opening, Midi Soraya selaku host menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang menjadi bagian dari Kekayaan Intelektual.

“Baru-baru ini DJKI merilis aplikasi POP-HC dalam melindungi para konten kreator di Indonesia” ujar Midi

Menjelaskan arti dari Hak Cipta Nurka menjelaskan bahwa saat ini masih banyak yang masih tertukar atau belum mengerti tentang arti hak cipta itu sendiri.

Menjawab pertanyaan terkait pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, Nurka menjelaskan bahwa Yang di-

maksud pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Selanjutnya menjawab terkait potensi permohonan pencatatan hak cipta dari aspek tri dharma perguruan tinggi bidang

pendidikan dan pengajaran, Ade Arif menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan banyaknya Perguruan Tinggi maupun dosen pengajar serta banyaknya jumlah mahasiswa yang mencapai 9.000.000 jiwa berarti potensi permohonan pencatatan hak cipta sangat tinggi sekali.

"Karena Dosen maupun mahasiswa merupakan unsur civitas akademika yang saling bersinergi dalam melakukan tri dharma, baik pengajaran, penelitian, dan

Pengabdian" Ujar Ade Arif

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 60 menit ini diakhiri dengan dialog secara telepon oleh para penonton setia Radar TV Lampung. •

”

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual sendiri adalah Hak yang kita dapat secara hukum dari hasil olah pikir kita dan kreativitas kita yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bisa bermanfaat bagi orang lain

ucap Nurka



Syukuran HBP Ke 58, Dirjen Pemasyarakatan: Omset dari One Day One Prison's Product 3 Milyar Lebih!

26/04 



▲
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Reynhard Silitonga saat menyampaikan laporan Hari Bhakti Pemasyarakatan

Bertempat di Aula Lapas Kelas IIB Kota Agung, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Syukuran menuju HBP Ke-58 secara virtual, Selasa (26/4). Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Dr. Farid Junaedi, Kepala Divisi Administrasi Topan Sopuan, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Bagian Program dan Humas Basnamara, Karutan Kelas IIB, Sohiburrachman, Karutan Kelas II Krui Hendra Ibmanasyah serta Kabapas Pringsewu Prayudha Rachmadhani.

”

Hasil penjualan produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Maret sampai 22 April 2022 dengan total 3.245 transaksi telah meraup omset sebesar 3 Milyar Lebih

—
kata Reynhard

Pertambahan usia Pemasarakatan yang ke-58 tahun disambut bahagia oleh jajaran Pemasarakatan di seluruh Indonesia. Suka cita ini akan dirayakan melalui acara Syukuran Menuju Hari Bakti Pemasarakatan (HBP) Ke-58.

Irjen Pol. Reynhard Silitonga dalam laporannya menyampaikan jika telah dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HBP Ke-58 yang mengikutsertakan UPT Pemasarakatan maupun masyarakat luas diantaranya lomba logo, lomba Vlog, lomba film pendek, lomba inovasi pelayanan publik pemasarakatan serta program One Day One Prison's Product. One Day One Prison's Product adalah ajang pengenalan dan pemasaran serta penjualan produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan.

Lebih lanjut itu Reynhard menjelaskan jika omset dari hasil penjualan produk warga binaan pemasarakatan melalui program One Day One Prison's Product telah mencapai 3 milyar lebih. Syukuran HBP Ke-58 ini dimeriahkan penampilan seni warga binaan dan petugas pemasarakatan, fashion show, pameran hasil karya warga binaan, pengumuman dan penyerahan penghargaan berbagai lomba rangkaian HBP Ke-58, pengundian pemenang One Day One Prison's Product, serta berbagai acara menarik lainnya.

Junjung Tinggi Nilai Luhur Pemasarakatan

Kakanwil Edi Kurniadi berharap dengan semakin bertambahnya usia pemasarakatan semakin matang pula jajaran dalam berpikir dan berprilaku.

"Saya Harapkan dengan bertambahnya usia pemasarakatan Ke-58, kita semakin matang semakin dewasa dalam berpikir dan berprilaku dan dapat terus berkontribusi kepada pemasarakatan yang kita cintai ini," ujar Edi.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Edi memotong tumpeng seraya berpesan untuk memanfaatkan HBP Ke-58 ini sebagai momentum untuk berkontribusi dengan lebih baik kepada jajaran pemasarakatan. •

”

Kita jadikan momentum ulang tahun pemasarakatan ke-58 ini yang mengusung tema Pemasarakatan PASTI dan BerAKHLAK Mewujudkan Indonesia Maju, kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ada di pemasarakatan

pesan Edi



Edi memberikan sambutan sebelum pemotongan tumpeng tasyakuran HBP Ke-58

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 58, Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Upacara dan Tabur Bunga

20/04



Rabu (20/04) Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 58, Seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung melaksanakan Upacara dan Tabur Bunga yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang. Upacara dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi. Turut hadir juga Seluruh Kepala Divisi Kemenkumham Lampung dan Seluruh Kepala UPT dibawah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung.

Upacara dan Tabur Bunga ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap Tahunnya. Dalam suasana khidmat Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi berpesan untuk tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului, menghayati perjuangan mereka serta tetap menjadikan sifat rela berkorban yang di miliki para Pahlawan Bangsa sebagai tauladan dan contoh dalam bersikap.

Setelah seluruh rangkaian Upacara berjalan lancar dan khidmat, Kakanwil juga memberikan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang dan dilanjutkan dengan prosesi Tabur Bunga oleh seluruh peserta Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke 58 ini. •



Edi memimpin upacara tabur bunga Hari Bhakti Pemasyarakatan



◀ Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil kemenkumham Lampung se usai tabur bunga pada makam pahlawan



◀ PIPAS Lampung turut serta dalam upacara tabur bunga HBP Ke-58

Monev Lapas Kalianda, Kemenkumham Lampung Salurkan Bantuan kepada UMKM Sekaligus Resmikan Ruang Pelayanan Publik

21/04



Pada bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung, Edi Kurniadi tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina unit pelayanan teknis (UPT) pada Jajaran Kantor Wilayah Lampung dengan melaksanakan serangkaian monitoring dan evaluasi (monev).

Pada Senin (21/4), Edi Kurniadi yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Pemasarakatan, Dr. Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto; beserta jajaran melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kalianda, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian keamanan dan ketertiban lembaga

pemasarakatan selama Bulan Ramadhan. Kunjungan Kepala Kantor Wilayah dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas, Tetra Destorie beserta jajaran. Turut menghadiri kegiatan Sekretaris Daerah Lampung mewakili Bupati; Kapolres Lampung Selatan; Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan; Kepala Pengadilan Negeri Kalianda; Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan; BNNK Lampung Selatan; Kepala Cabang BRI Kalianda.



Kakanwil Edi salurkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada masyarakat ▶

Sebagai bukti nyata bahwa pemasyarakatan peduli usaha mikro kecil dan menengah, kegiatan monev dirangkaikan dengan penyaluran bantuan gerobak dan modal usaha kepada masyarakat. Terkait hal ini Edi mengapresiasi BRI Cabang Kalianda yang keterlibatannya mampu membantu menyukseskan bakti sosial ini.

Pada kesempatan ini juga Edi sekaligus meresmikan ruang layanan publik lapas kalianda, yang pembangunannya bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan publik yang prima dan sebagai satu bentuk semangat Lapas Kalianda menuju satuan kerja berpredikat WBBM

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi menuturkan bahwa kegiatan monitoring merupakan proses t i n j a u

”

Masih dalam rangkaian giat Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-58, dalam leading sector peduli ekonomi kerakyatan, alhamdulillah pada hari ini bersama sama telah kita saksikan Lapas Kalianda telah memfasilitasi bantuan gerobak dan modal usaha kepada masyarakat sebagai bukti nyata bahwa pemasyarakatan peduli usaha mikro kecil dan menengah, semoga bermanfaat bagi yang menerima. terima kasih kepada BRI Cabang Kalianda yang turut menyukseskan kegiatan ini

ujar Edi



dan pantau terhadap perkembangan pelaksanaan aktivitas program dengan mengacu pada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi bertujuan antara lain untuk menganalisis relevansi/efisiensi/dampak dan keberlanjutan pelaksanaan program kerja.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai suatu koreksi yang menjadi proyeksi serta menghasilkan formulasi pada kegiatan dan langkah organisasi menjadi optimal efektif dan efisien.” tutur Edi.

Kegiatan monev yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-58,



Edi menegaskan bahwa ini adalah momentum penting seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus mengukuhkan komitmennya dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

“Dengan tema Pemasyarakatan PASTI dan Berakhlak Mewujudkan Indonesia Maju, dengan berbekal tata nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif (PASTI) yang dijunjung seluruh pegawai kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia serta tiga kunci pemasyarakatan yaitu deteksi dini, berantas narkoba dan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, serta melaksanakan program pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan (back to basics), saya berpesan lakukan semaksimal mungkin agar hasil memuaskan.” tegas Edi.

Dorong Roda Perekonomian

Dalam menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-58, Lapas Kelas I Bandar Lampung melaksanakan Bakti Sosial serta penyerahan bantuan kepada UMKM pada Jumat (22/3/2022). Hadir langsung Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi didampingi Kapanas I Bandar Lampung Maizar beserta jajaran.

Tercatat penerima bakti sosial ini adalah 100 orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar Lapas Kelas I Bandar Lampung. Harapannya dengan adanya bakti sosial ini dapat membantu beban masyarakat yang terdampak di masa pandemi.

Selanjutnya Edi serta Maizar menyerahkan bantuan UMKM berupa gerobak dagang yang mer-



”

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari jajaran Lapas Kelas I Bandar Lampung, semoga bantuan ini dapat membantu usaha kami di masa pandemi

ucap Zaleha

upakan hasil Kerjasama dengan BRI cabang Tanjungkarang.

Edi menjelaskan jika bantuan ini merupakan wujud kepedulian jajaran pemasyarakatan kepada pelaku UMKM. Adapun penerima bantuan UMKM ini adalah Siti Zaleha. Ia berharap dengan bantuan tersebut pelaku UMKM mampu bertahan hidup di tengah

kondisi ekonomi saat ini sekaligus menjaga roda perekonomian di Kota Bandar Lampung.

Sebagai penerima bantuan gerobak, Siti Zaleha mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Lapas Kelas I Bandar Lampung atas bantuan yang diberikan kepadanya. •

Sangat Mudah! Kadivyanakum Ajak Masyarakat Kenali Perseroan Perorangan dan Syarat Pendiriannya

25/04



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Alpius Sarumaha sosialisasikan Perseroan Perorangan

Senin (25/4), Bertempat di Radar Lampung TV, Kanwil Kemenkumham Lampung gelar diseminasi terkait Perseroan Perorangan dengan tema “Kenali Perseroan Perorangan dan Syarat Mendirikannya.” Diseminasi yang dihadiri stakeholder terkait dan masyarakat umum ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui platform Youtube.

Kanwil Kemenkumham Lampung yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

Dr. Alpius Sarumaha memberikan penjelasan jika saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memberikan dukungan penuh kepada usaha Kecil dan UMK. Dukungan tersebut merupakan salah satu manfaat adanya UU Cipta Kerja yaitu dengan memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) bagi pengusaha.

Mengawali penjelasan dengan perbedaan perseroan perorangan dengan perseroan terbatas Dr. Alpius menyampaikan jika untuk mendirikan Perseroan Terbatas

pengusaha harus memiliki modal minimal 25 juta, terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komunitas, diumumkan tambahan berita negara RI, membutuhkan akta notaris. Sedangkan dalam Perseroan Perorangan bebas menentukan modal, bersifat one tier (dimana pendiri akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan) , tidak diwajibkan mengumumkan berita negara, tidak membutuhkan akta notaris, serta biaya pendaftaran perseroan perorangan hanya Rp. 50.000.

Lebih lanjut Alpius mengajak kepada UMK dan Usaha Kecil di Provinsi Lampung untuk mendaftarkan usahanya melalui Perseroan Perorangan karena keuntungan yang akan didapat nantinya. Adapun kemudahan layanan yang didapat bagi Perseroan Perorangan seperti kemudahan akses pinjaman di seluruh Bank Himbara, usaha berbentuk badan hukum serta tanggung jawab terbatas, dan keistimewaan pembayaran pajak yang lebih murah dibandingkan dengan Perseroan Terbatas.

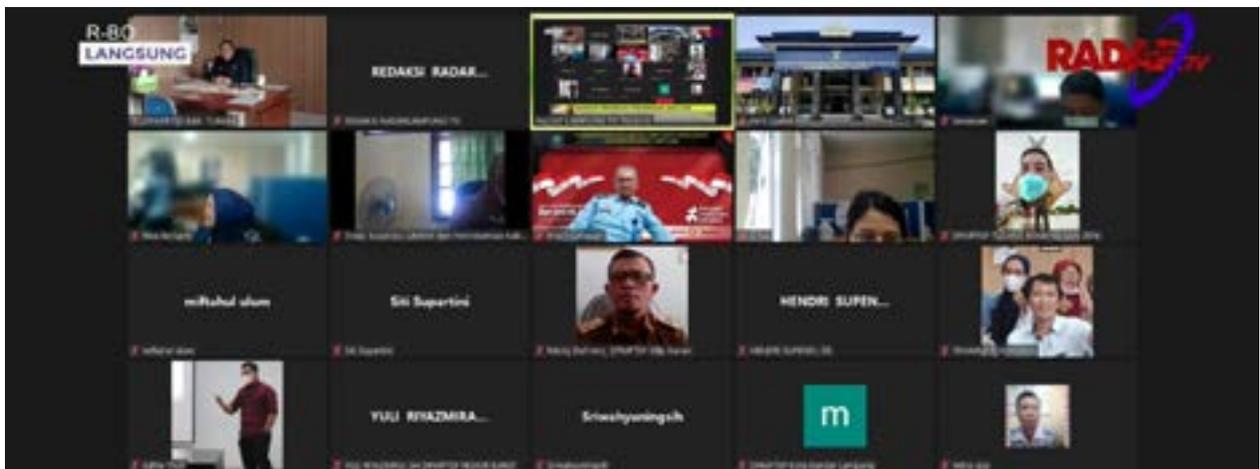
Proses pendaftaran Perseroan Perorangan yang mudah melalui pengajuan online, masyarakat dapat langsung mengakses laman ahu.go.id.

Terakhir Alpius menyinggung peran Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah melakukan berbagai upaya dalam menyebarkan informasi terkait Perseroan Perorangan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi serta koordinasi dengan stakeholder terkait serta pemerintah daerah. Selain itu Kanwil Kemenkumham Lampung juga akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan usahanya melalui Perseroan Perorangan. •

”

Masyarakat jangan khawatir jika kesulitan mendaftar Perseroan Perorangan, masyarakat dapat langsung konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Lampung atau by phone, kita akan bantu jika ada kesulitan-kesulitan

ujar Alpius



Sambut Hari KI Sedunia Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Inventarisasi KIK di Kabupaten Tulang Bawang

25/04



Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung No.800/1824/V.01/DP.SB/2021 Tentang Permintaan Laporan Periodik Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, dimana Kanwil Kemenkumham Lampung mendatangi untuk “jemput bola” dan hal penginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Disambut oleh Triana Amalia Sari dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulang

Bawang, Triana menyampaikan bahwa kekhawatiran Kabupaten Tulang Bawang adalah Budaya asli di Tulang Bawang yang nantinya dapat diambil oleh daerah lain.

Triana juga menjelaskan bahwa terdapat 6 Warisan Budaya Tak Benda Asal Kabupaten Tulang Bawang, “Tapis, Sulam Usus, Serumit, Tari Bedayo Tulang Bawang, Singer Lampung, hingga Mukew Sahur, merupakan Warisan Budaya Tak Benda yang ada di Kabupaten

Tulang Bawang”, Ujarnya

Harapannya dengan kedatangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang menginventarisasi di Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik dapat melindungi Kekayaan Intelektual Komunal di Wilayah Provinsi Lampung khususnya Kabupaten TULANG BAWANG.



Tim Kanwil Kemenkumham Lampung lakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Tulang Bawang



KEKAYAAN INTELEKTUAL MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

Tegas Menkumham Yasonna

26/04



Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

“Banyak negara maju yang bergantung pada Kekayaan Intelektual yang dimiliki, mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, pembangunan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual sangat bergantung pada ekosistem Kekayaan Intelektual, yang merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, elemen proteksi, dan elemen utilisasi.

Elemen kreasi sebagai bahan bakar dari ekosistem Kekayaan Intelektual yang berperan dalam menghasilkan kreasi Kekayaan Intelektual yang kreatif dan inovatif.

Adapun elemen proteksi sebagai minyak pelumas/oli dari ekosistem Kekayaan Intelektual yang berperan memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas melalui perolehan, penegakan hak dan pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Sedangkan elemen utilisasi sebagai mesin dari ekosistem Kekayaan Intelektual yang berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk Kekayaan Intelektual.

“Keberhasilan dan kelancaran dalam siklus ekosistem Kekayaan Intelektual akan mendorong pertumbuhan ekonomi

”

Saya mengajak seluruh masyarakat, terutama kaum muda untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya, dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

ujar Yasonna

nasional,” ungkap Yasonna.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya alam, memiliki banyak produk unggulan dan potensial untuk mendapat tempat di pasar internasional.

Salah satu rezim Kekayaan Intelektual Komunal yang perlu didorong agar mampu bersaing di pasar global adalah produk yang berbasis pada potensi geografis Indonesia, dan dikenal sebagai Indikasi Geografis (IG).

“Indikasi Geografis terbukti dapat menjadi katalisator tidak hanya bagi nation branding tapi juga mendukung kemandirian ekonomi suatu negara. Selain itu terdapat potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang beririsan dengan pengembangan pariwisata.” ungkap Yasonna.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul dari ha-

sil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektualnya.

Berdasarkan sifat kepemilikan, Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan ke dalam dua jenis kategori kepemilikan yaitu kepemilikan personal seperti hak cipta, paten, merek dan desain industri, serta kepemilikan komunal seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis.

Acara Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-22 Tahun 2022 yang dirayakan setiap tahunnya oleh negara-negara di seluruh dunia yang pada tahun ini mengambil tema: “IP and Youth Innovating for a 4 Better Future” didukung dengan tema nasional “Memacu Kreativitas dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Monev UPT Pemasyarakatan se-Kota Metro, Kakanwil: Deteksi dini, Berantas Narkoba, Maksimalkan Pelayanan bagi Masyarakat dan WBP

25/04



Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran, berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atau WBP, perhatikan hak-hak mereka khususnya Remisi Lebaran, jangan sampai ada yang terlambat

ucap Edi

Bertempat di Lapas Kelas IIA Metro, Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait keamanan dan ketertiban pada Jumat (22/4/2022). Turut mendampingi Kepala Divisi Administrasi Topan Sopuan, Kepala Bidang Pembinaan Yuniarto dan Kepala Bagian Umum Hadiyanto. Kakanwil beserta jajaran disambut langsung oleh Kalapas Metro Mulyana Kabapas Metro Sukir serta Plt. Karupbasan Metro Dimas.

Mulyana dalam laporannya menyampaikan jika saat ini kondisi Lapas Kelas IIA Metro su-

dah kondusif, aman dan tertib. Lebih lanjut jika 584 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Metro lebih dari separuhnya telah mendapat vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster, sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan terkendali.

Monev yang dihadiri oleh jajaran pemasyarakatan se-Kota Metro ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama bulan ramadhan dan menjelang lebaran. Edi Kurniadi juga menyampaikan untuk terus senantiasa waspada dalam menghadapi gangguan Kamtib.

“Tidak terasa kita telah memasuki akhir ramadhan serta menjelang lebaran, tetap jaga keamanan Lapas dengan melakukan deteksi dini serta pemberantasan narkoba,”

Lebih Lanjut Edi juga berpesan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan WBP.

Di akhir Edi menghimbau kepada seluruh jajaran untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi agar tetap sehat dan dapat bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya

Peresmian Aula dan Lapangan Tenis

Dalam kesempatan yang sama selepas memberikan penguatan kepada jajaran yang hadir, Kepala Kantor Wilayah Edi Kurniadi menandatangani batu prasasti tanda peresmian Aula Usman Pokok Ratu dan Lapangan Teknis Metro Berkelas 24.

Edi menyinggung mengenai pemilihan nama yang dipilih untuk Aula yang baru saja diresmikan. "Saya mengapresiasi pemilihan nama untuk Aula yang baru ini. Usman Pokok Ratu merupakan sosok panutan saya, saya pernah berada dibawah pimpinan beliau". ujar Edi.

Perlu diketahui, Usman Pokok Ratu adalah putra daerah Lampung yang merupakan Kapas Metro yang kedua, hal ini yang mendasari pemilihan nama untuk Aula yang baru saja diresmikan. •



Kakanwil Edi resmikan Aula Usman Pokok Ratu dan Lapangan Tenis Metro Berkelas



Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Yankomas Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Klarifikasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji

25/04



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Alpius Sarumaha pimpin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji

Selasa (26/4) Tim Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Alpius Sarumaha melaksanakan kegiatan klarifikasi dan koordinasi ke Pemerintah kabupaten Mesuji, sebagai tindak lanjut dari Aduan Penyampaian Komunikasi tentang dugaan diskriminasi dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada Masyarakat yang bermukim di Kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji.

Pertemuan dengan pihak Kabupaten Mesuji dimulai pukul 10.00 WIB, disambut oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Indra Kusuma Wijaya, acara ini juga dihadiri Kepala Dinas terkait seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMD dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Asisten I menyambut baik kedatangan tim Yankomas Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan dengan senang hati

memberikan keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan, tujuan kedatangan tim Yankomas ke Kabupaten Mesuji adalah amanat Undang-undang yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bagi semua masyarakat terpenuhi dengan baik serta tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ingin melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait informasi yang

diterima dari Penyampai Komunikasi terkait dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada warga yang bermukim di Kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji.

Isu utama dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dimaksud adalah diskriminasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Dalam Penjelasannya kepada Tim Yankomas. Asisten I menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa warga yang bermukim di register 45 nama desa dan lokasinya tidak tercantum dalam database disdukcapil, hal ini karena tanah register 45 merupakan Kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan, sehingga Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal ini. Karena desa dalam permendagri, desa definitive dilarang berdiri di lahan negara. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa dalam pelayanan Kesehatan.

Warga yang bermukim di register 45 juga tetap dilayani di

”

Isu utama dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dimaksud adalah diskriminasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Dalam Penjelasannya kepada Tim Yankomas. Asisten I menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

faskes maupun fasum sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada diskriminasi apapun.

Pertemuan yang berlangsung selama 2 (dua) jam tersebut membahas isu-isu penting lainnya dan melakukan tanya jawab untuk konfirmasi aduan penyampai komunikasi. Diakhir pertemuan, Asisten I bidang pemerintahan juga menyampaikan

kesediaannya apabila Tim Yankomas membutuhkan data jika sewaktu-waktu diperlukan. Sebagai penutup Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang sudah terbangun dengan baik selama ini, dan hasil pertemuan hari ini akan dijadikan bahan laporan untuk pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. •



Rayakan Hari Kemenangan, 4.976 Warga Binaan Lapas, Rutan, & LPKA Wilayah Lampung Dapatkan Remisi Khusus Idulfitri 1443 H

02/05



Kakanwil, Edi Kurniadi (dua dari kanan) bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Maizar se usai menyerahkan Remisi Idulfitri

Sebanyak 4.976 Warga Binaan Lapas, Ritan, & LPKA di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1443 H pada hari ini, Senin (02/05/2022). Remisi khusus ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : PAS-609.PK.05.04 tahun 2022 Tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 1443 H Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi didampingi oleh Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar memimpin langsung kegiatan Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri 1443 H yang dilaksanakan pada Aula Lapas Kelas I Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan setelah melakukan sholat Idul Fitri bersama seluruh petugas dan Warga Binaan Pemasayarakatan.

Pada kesempatan ini, Kakanwil Kemenkumham Lampung juga membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang mengatakan bahwa remisi yang diberikan merupakan bentuk penghargaan atas perubahan perilaku yang ditunjukkan Warga Binaan ketika menjalani pidana di Lapas/Rutan/LPKA. Pemberian Remisi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga Warga

”

Pemberian Remisi ini merupakan wujud dan bukti nyata Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkomitmen untuk selalu memberikan hak Warga Binaan dengan memberikan pelayanan yang terbaik melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian

ucap Edi



Binaan dapat segera kembali di tengah masyarakat.

Kakanwil Kemenkumham Lampung juga menyampaikan selamat kepada para Warga Binaan yang telah mendapatkan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1443H.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri ini diharapkan dapat dijadikan sebagai renungan dan motivasi Warga Binaan untuk selalu introspeksi diri dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kegiatan ditutup dengan pembacaan Surat Keputu-

san Remisi Khusus dan dilanjutkan dengan pemberian Surat Keputusan Remisi Khusus secara simbolis kepada perwakilan Narapidana oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. •



Halal Bihalal 1 Syawal 1443 Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM”, Menkumham: Setelah Kita Saling Bermaafan, Saatnya Kita Kembali Fokus Bekerja

09/05



Menkumham, Yasonna H. Laoly memimpin apel dan halal bihalal secara serentak di lingkungan Kemenkumham RI

Dalam rangka pelaksanaan apel pagi Pegawai yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal 1 Syawal 1443 H keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dilaksanakan secara hybrid (langsung dan virtual) yang bertempat di lapangan Upacara Kemenkumham, Kuningan Jakarta Selatan.

Apel dan halal bihalal 1 syawal 1443 H dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri, Penasehat Kehormatan Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, serta para Perwakilan ASN Unit Utama. Sedangkan mengikuti secara virtual, Seluruh ASN pada Kantor Wilayah

dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia mengikuti secara bersamaan.

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy

Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha, Para Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas serta para Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung mengikuti secara Virtual Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Yasonna mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

"Perayaan Idul Fitri merupakan ekspresi kebahagiaan, ungkapan rasa syukur dan keinginan untuk saling memaafkan serta introspeksi diri" Ujar Yasonna

"Cek kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya harus kita selesaikan secara baik dan dapat dipertanggung

jawabkan, realisasikan anggaran sesuai disbursement plan yang telah dibuat" Ucapnya

Sebelum menutup arahan sekaligus sambutannya, Yasonna mengingatkan untuk menjadikan semangat SEMAKIN PASTI dan BerAKHLAK sebagai tata nilai dan landasan dalam bekerja sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

"Terakhir, Pandemi Covid-19 belum berakhir ditambah berbagai penyakit baru seperti hepatitis akut, kondisi demikian jangan membuat kita khawatir namun mengharpkan kita semua agar disiplin dalam hal protokol Kesehatan serta mampu beradaptasi dan dapat bertransformasi di era disrupsi ini" Tuturnya. •

”

Setelah kita saling bermaafan, saatnya kita kembali harus fokus bekerja, khususnya pencapaian target kinerja pada semester kedua tahun 2022 ini

tegas Yasonna



Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Lampung mengikuti jalannya kegiatan secara virtual di Aula

Jalin Sinergitas Bersama Media, Kakanwil Ingin Kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung Dapat Dipantau Masyarakat

10/05



Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi serahkan cinderamata kepada Tim dari Lampung Post

Bertempat di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dr. Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha, Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara,

dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, TI, Arlisa Noviriantono menyambut kedatangan rekan-rekan Media Indonesia grup dari Lampung Post, Selasa (10/05/2022)

Menyampaikan apresiasi atas kedatangan rekan-rekan media, Edi Kurniadi juga menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan rekan-rekan media harus

terjalin dengan baik, hal ini juga agar kegiatan-kegiatan kinerja di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dapat diekspos oleh rekan-rekan media dan diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.

Edi juga menyampaikan bahwa dengan Keterbukaan Informasi Publik hal ini juga secara berdampak akan berpengaruh dengan kualitas pelayanan publik khususnya

”

“Saya berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media-media terkait dengan Kinerja Kanwil Kemenkumham Lampung harus dilakukan secara berkelanjutan, hal ini bertujuan agar informasi publik sampai langsung ke masyarakat

ujar Edi



ya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Senada dengan Kakanwil, Topan Sopuan juga menyampaikan bahwa selain dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung diharapkan media-media juga dapat memberikan fasilitas publikasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Lapas/Rutan/ Kantor Imigrasi sehingga kinerja UPT juga dapat tersampaikan ke masyarakat. Dalam perbincangan dengan para pimpinan tinggi prat-

ama di kanwil kemenkumham Lampung, Iskandar Zulkarnain selaku pemimpin Redaksi Lampung Post menyampaikan “Lampung post selama ini telah menjalin hubungan yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Lampung”Ujar Iskandar

Iskandar juga berharap jalinan sinergitas antar sesama awak media dapat menjalin Komunikasi

den- gan baik, hal ini juga bertujuan agar media yang membuat berita baik dari wartawan senior maupun junior dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. •



**Audiensi Gubernur Lampung,
Kakanwil Bahas Lapas/Rutan/Kanim
Hingga Kabupaten/Kota Peduli HAM**





11/05



Rabu (11/05/2022) Memperkuat sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dr. Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha melakukan Audiensi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Bertempat di Mahan Agung, Arinal yang didampingi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, M.Firsada dan Kepala Biro Hukum Puadi Jailani menyambut kedatangan Kakanwil Kemenkumham Lampung dan rombongan.

Membuka perbincangan, Arinal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selalu siap membantu dan berkoordinasi dengan kegiatan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

”

Pemerintah Provinsi Lampung siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

ujar Arinal



Kakanwil Edi Kurniadi saat melakukan audeiensi dengan Gubernur Lampung

“Pemerintah Provinsi Lampung siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung” Tegas Arinal

Edi Kurniadi juga menyampaikan bahwa dengan kondisi akses jalan menuju salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Area Way Huwi m a s i h terdapat

kondisi jalan yang sudah mulai rusak, hal itu dikhawatirkan menjadikan hambatan dalam proses kegiatan di UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.

Selanjutnya, Edi Kurniadi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terdapat 60% persen WBP di Wilayah Lampung berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba, untuk itu Edi berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menimbang terkait dengan Ruang Rehabilitas yang juga berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

Membahas terkait dengan Pelayanan Hukum dan HAM, Edi Kurniadi dan Alpis menyampaikan bahwa saat ini telah berjalan dengan berkoordinasi dengan Bagian H u k u m Provinsi



Lampung terkait persoalan Kabupaten/Kota Peduli HAM sebanyak 14 Kabupaten dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Dalam perbincangan, selain dengan persoalan diatas, Arinal juga meminta terkait dengan penerima bantuan hukum harus dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Lampung, Arinal mencontohkan salah satunya Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya, Is Eko juga menyampaikan bahwa Pelayanan Publik kepada masyarakat Provinsi Lampung khususnya di bidang Keimigrasian. "Melalui petunjuk dan arahan Direktorat Jenderal

Imigrasi, Jaringan Kanwil Kemenkumham Lampung pada seluruh UPT Kantor Imigrasi telah menjalankan Easy Paspor, Layanan Paspor Simpatik, dan Hand Paspor" Ujar Is Eko. Menutup rangkaian Audiensi, Gubernur Lampung mengharapkan dari audiensi ini mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan khususnya pada Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Dan diharapkan demi Lampung Berjaya, Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta menjalin hubungan baik dengan seluruh Forkopimda Lampung. •

”

Baik Pelanggaran Hukum maupun Pelanggaran HAM, saya berharap masyarakat Lampung dapat mendapatkan atau menerima bantuan hukum

ujar Arinal



Kobarkan Semangat Back To Basic, Kadiv Pemasarakatan Kembali Himbau Jajaran Untuk Fokus Berantas Narkoba

13/05



Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dr. Farid Junaedi melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung terkait semangat Back To Basic dalam memberantas Narkoba pada hari ini, Jumat (13/05/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari UPT Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Dalam kesempatan ini, Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Lampung menghimbau kepada seluruh jajaran untuk fokus dalam pemberantasan Narkoba dengan rutin melakukan deteksi dini, solidaritas antar petugas, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

"Lakukan deteksi dini dengan mengumpulkan data, dari laporan yg disampaikan petugas lapangan kemudian analisa data tersebut untuk menentukan langkah tepat dalam Berantas narkoba." Ujar Kadiv Pas

Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi saat memberikan arahan kepada jajaran UPT Pemasarakatan



Selain itu, deteksi dini dengan melakukan pengeledahan rutin dan Salam Pemasarakatan serta konseling juga dapat dilakukan untuk mengenal WBP dan dapat melakukan pencegahan. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang ada juga termasuk salah satu cara pencegahan. Back to basic dicetuskan karena pada beberapa bagian tidak mengikuti SOP yang ada dalam melaksanakan kegiatan dalam lapas, sehingga harus dikembalikan keranah awal yaitu SOP dengan melaksanakan kembali SOP yg ada.

”

Jangan salahkan bila KPLP atau KPR dicopot bila setiap tugas tidak mengenal dan melaksanakan sesuai dengan SOP

tegas Farid

“Jangan salahkan bila KPLP atau KPR dicopot bila setiap tugas tidak mengenal dan melaksanakan sesuai dengan SOP” Imbuhnya.

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Lampung juga menghimbau kepada seluruh jajaran untuk menjaga nama baik Satuan Kerja dengan terus melakukan evaluasi dan memberikan kinerja terbaik sehingga hanya berita-berita positif yang beredar di masyarakat. •



22 OBH Terakreditasi dan Terverifikasi Laksanakan Penandatanganan Perubahan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum TA. 2022

13/05



Kakanwil Edi Kurniadi menyaksikan Penandatanganan Perubahan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum

Selasa (17/05/2022) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Penandatanganan Perubahan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 bersama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung.

Sebanyak 22 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi dan Terverifikasi Melaksanakan Penandatanganan Perubahan Kontrak Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum

Tahun Anggaran 2022 dikarenakan adanya perubahan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Sebelum melaksanakan Penandatanganan Perubahan Kontrak Kerja, Turut memberikan sambutan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih atas OBH yang telah hadir, menurutnya Kegiatan ini juga sebagai bentuk laporan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

terkait kegiatan OBH di Provinsi Lampung. Dr. Alpius juga berharap agar kedepan tetap diadakan pertemuan untuk menjalin sinergitas dan hubungan kerja yang baik.

Selanjutnya memberikan sambutan, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi menyampaikan bahwa agenda hari ini merupakan Penandatanganan Ulang Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 terhadap organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat merupakan upaya negara kepada rakyat untuk mengakses keadilan" Ujar Edi

Edi menjelaskan bahwa secara teknis pelaksanaan bantuan hukum tidak dilakukan oleh pemerintah melainkan melalui OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN.

"Untuk itu demi tercapainya Bantuan Hukum gratis khususnya untuk masyarakat Lampung diperlukan komunikasi intensif antara Kanwil dan Para OBH" Terang Edi.

”

Maksud dan tujuan Bantuan Hukum melalui penyuluhan hukum diharapkan dapat menciptakan masyarakat sadar hukum dengan mengadakan bantuan hukum gratis

tegas Farid

Rapat Bersama

Rapat Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama dengan Seluruh Organisasi bantuan Hukum (OBH) yang

telah Terakreditasi di Provinsi Lampung yang menghadirkan 1 (satu) orang Direktur/Ketua dari masing-masing OBH.

Sebelum kegiatan rapat bersama dilaksanakan, terlebih dahulu pelaksanaan penandatanganan Perubahan Kontrak Pelaksanaan bantuan Hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan secara simbolis yang diwakilakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama



Lampung serta disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Memasuki Kegiatan Rapat Bersama OBH, Dr. Alpius menyampaikan untuk menjalin silaturahmi dengan OBH yang terverifikasi dan terakreditasi, maka kedepan-

nya akan diagendakan pertemuan paling tidak sebulan sekali dengan OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Provinsi Lampung.

Selain itu, Dr. Alpius juga mengharapkan kepada OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi dapat mendukung kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mendaftarkan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM dan menerapkan free of charge kepada pelaku umkm. "Hal ini guna membangun dan memajukan kegiatan UMKM yang ada di Provinsi Lampung, sedangkan untuk pendaftaran hanya cukup membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50.000 rupiah Sesuai Dengan PP Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" Ujar Dr. Alpius

Agenda ini juga sebagai diskusi terkait keluhan atau permasalahan yang

dialami oleh OBH terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik dari segi pendanaan ataupun administrasi pendukung. •

Kakanwil Edi Kurniadi Buka Secara Resmi Sosialisasi Layanan AHU Tentang Perseroan Perorangan

13/05



Kakanwil Edi Kurniadi pukul gong, membuka sosialisasi layanan Perseroan Perorangan



Rabu (18/05/2022) Ber-
tempat di Ballroom Hotel
Novotel Lampung, Kan-
tor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Lampung
menggelar Sosialisasi Layanan
Administrasi Hukum Umum Ten-
tang Perseroan Perorangan den-
gan tema "Perseroan Perorangan
Akan Meningkatkan Daya Saing
Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
di Provinsi Lampung".

Mengawali Kegiatan Pem-
bukaan Sosialisasi, Kepala Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.
Alpius Sarumaha menyampaikan
laporan kegiatan. Dr. Alpius men-
yampaikan bahwa kegiatan ini
menghadirkan 3 (tiga) orang nara-
sumber antara lain Kepala Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM dari
Kanwil Kemenkumham Lampung,
Dr. Zulfi Diane Zaini selaku Aka-
demisi Fakultas Hukum Univer-
sitas Bandar Lampung, dan Rais
Gunawan selaku Wakil Pimpinan
PT. Bank Negara Indonesia
Cabang Tanjung Karang.
Dr. Alpius berharap dengan

”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan solusi atas berbagai kendala regulasi, merupakan suatu terobosan dalam kerangka penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang melahirkan suatu korporasi yang baru dengan entitas Badan Hukum Perseroan Perorangan”

ujar Edi

adanya kegiatan sosialisasi maka diharapkan pelaku usaha dapat mendaftarkan diri untuk perseorangan yang nantinya akan meningkatkan ekonomi di Provinsi Lampung. Selanjutnya, memberikan sambutan sekaligus membuka Kegiatan secara resmi, Kepala Kantor Wilayah, Edi Kurniadi menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi mer-

upakan leading sector yang dapat diwujudkan dalam transformasi ekonomi.

Edi menjelaskan Perseroan Perorangan memiliki karakteristik dan keuntungan, yakni dapat didirikan oleh satu (1) orang, dan tidak memerlukan anggaran dasar cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan melalui media elek-

tronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran.

Menutup sambutannya, Edi berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat serta hasil dengan yang diharapkan seluruh peserta.

Perlu diketahui, Peserta Kegiatan sosialisasi terdiri dari Dinas Koperasi, UMKM, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Lampung, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Lampung serta UMKM di Wilayah Provinsi Lampung. Turut Hadir dalam Kegiatan Sosialisasi, Kepala Divisi Pemas-yarakatan, Dr. Farid Junaedi, Bersama Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso, dan Kepala Bagian Hukum, Rugun Tresia OP. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber. •



Dukung Penegakan Supremasi Hukum, Kakanwil Kemenkumham Lampung Resmi Buka Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum

19/05



Dukung penegakan supremasi hukum melalui Masyarakat Cerdas Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung membuka secara resmi kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu pada hari ini, Kamis (19/05/2022) yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah. Kegiatan yang mengusung tema "Menjaga Persatuan Bangsa dengan melawan Hoaks dan Ujaran Kebencian" ini diikuti oleh penyuluh hukum Kanwil kemenkumham Lampung serta perwakilan akademisi dan mahasiswa dari universitas di wilayah Provinsi Lampung.

Turut hadir dalam aca-

ra ini Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Masyarakat, Dr. Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha; serta pejabat struktural dan pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Kegiatan ini diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang juga merupakan Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP yang pada laporannya menyampaikan bahwa saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah memiliki 15 (lima belas) orang Tenaga Fungsional Penyuluh Hu-

kum, 3 (tiga) orang Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya, 9 (sembilan) orang Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda dan 3 (tiga) orang Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, mereka bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), instansi terkait serta pemerintah kota/kabupaten, merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang berkelanjutan terus dilakukan dalam rangka membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi. Pada kesempatan ini Kakanwil Kemenkumham Lampung menyampaikan bahwa era digital saat ini informasi dengan cepat bisa beredar melalui media-media sosial, terkadang kemunculan berita tersebut bisa meresahkan dan mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat. Informasi yang telah disebar akan dibaca banyak orang dan dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok masyarakat. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda, mengingat mereka harapan bangsa, generasi penerus yang akan melanjutkan estafet pembangunan.

Kegiatan Ceramah Penyuluh Hukum Terpadu yang mendatangkan Narasumber dari Sub Direktorat Cyber Crime Kepolisian Daerah Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung ini diselenggarakan dengan harapan dapat mendukung tercapainya masyarakat cerdas dan berbudaya hukum sehingga supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan

Bangun Masyarakat Cerdas Hukum

Pada kegiatan ini terdapat dua topik pembahasan yang disampaikan oleh para Narasumber. Sesi Pertama adalah pembahasan terkait menjaga persatuan bangsa dengan melawan hoaks dan ujaran kebencian oleh Sub Direktorat Cyber Crime Kepolisian Daerah Lampung, Kompol A.R. Hakim Rambe, S.Kom., M.Ti. Hakim Rambe menjelaskan Sisi Positif dan Negatif Dunia Maya dan Tindak Pidana yang memanfaatkan Teknologi Informasi serta dapat membedakan antara berita Hoax dan bukan Berita Hoax.

“Kegiatan ini saya harapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara membedakan berita hoax dan tidak, dan apa yang harus dilakukan jika menemukan berita Hoax. Jangan Menjadi Korban apalagi menjadi Pelaku” Ujar Hakim Rambe.

Pada sesi kedua adalah pembahasan terkait Penyebaran Hoax Merupakan Tindak

”

Berita hoax merupakan cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya dan memperdayakan. Berita hoax sangat berbahaya di masa sekarang yang penuh dengan Teknologi dan berdampak negative terhadap kehidupan social Masyarakat

ujar Samsi

Pidana oleh Kasi Kamnegtibus dan TPUL Kejaksaan Tinggi Lampung Samsi Thalib, SH.MH. Samsi Thalib Membahas mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh penyebar Hoax salah satu contoh yaitu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar”.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta kepada para narasumber yang disambut secara antusias, salah satu peserta dari Universitas Bandar Lampung yang menanyakan tentang upaya pemerintah agar informasi masyarakat dapat tersimpan dengan baik dan tidak menjadi hoax atau ujaran kebencian. •



Kasi Kamnegtibus dan TPUL Kejaksaan Tinggi Lampung, Samsi Thalib menjelaskan tindak pidana penyebaran hoax

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual , Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkumham Lampung Sambangi Pusat Perbelanjaan di Bandar Lampung

13/05



Tim Sub Bidang Pelayanan KI melakukan sosialisasi guna mencegah pelanggaran kekayaan intelektual

Dalam rangka mendukung salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu "Menjadikan Kekayaan Intelektual Sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Budaya". Jum'at (20/05/2022) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan salah satu Kegiatan yang mendukung program yaitu Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan maka Direktorat Penyidikan dan

Penyelesaian Sengketa diberikan amanah sebagai koordinator pelaksana kegiatan. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mendatangi Pusat Perbelanjaan di Area Kota Bandar Lampung.

Tim Sub Bidang Pelayanan KI melakukan Sosialisasi dan Edukasi yang menasar pengelola Pusat perbelanjaan dan Tenan-tenant. Selain itu, menurut Tim Subid Pelayanan KI, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual dan memberikan

apresiasi kepada pusat perbelanjaan yang telah berkomitmen untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang melanggar kekayaan intelektual.

Harapannya, dengan adanya Tim Subid Pelayanan KI dapat mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran KI. Pencegahan dilaksanakan dengan tujuan sebagai suatu tindakan preventif dari pemerintah untuk hadir ditengah masyarakat sebagai garda terdepan untuk mengurangi banyaknya pelanggaran Kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. •

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI OLEH STAF AHLI MENKUMHAM

Iwan Kurniawan

09/06





▲
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan berikan penguatan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung

Kamis (09/06), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Penguatan disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan.

Hadir dalam kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha. Turut hadir ditengah acara Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, Hantor Situmorang. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Lampung ini mengundang seluruh Kepala

la Satuan Kerja se-Lampung dan Tim Pokja Satuan Kerja yang mendampingi.

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi. Dalam sambutannya, Edi Kurniadi mengucapkan Selamat Datang dan Terima kasih atas Berkenannya Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi untuk hadir dan memberikan penguatan Nilai-nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Ditengah sambutan, Edi Kurniadi mengingatkan para Kepala Satker yang hadir untuk selalu menjaga komitmen dalam membangun Zona Integritas. "Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM ini perlunya komitmen bersama

antara Pimpinan beserta jajaran yang seiring sejalan. Terus melakukan inovasi yang mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan mempersempit peluang grativikasi atau pungli, serta mampu menjawab isu strategis dan sesuai core business." Tegas Edi.

Lebih lanjut, Edi Kurniadi menyampaikan bahwa jajaran kanwil Lampung telah melaksanakan Evaluasi secara langsung oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada 15 satuan kerja yang telah di usulkan oleh Tim Verifikasi Kantor Wilayah Lampung, diantaranya 3 Kantor Imigrasi dan 12 Satker Pemasarakatan mulai tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 05 Juni 2022. Dari hasil Evaluasi tersebut di dapati 8 Satuan kerja yang berkesempatan melanjutkan ke tahap penentuan Panel TPI diantaranya, 6 satuan kerja pemasarakatan : Lapas Bandar Lampung; Lapas Perempuan; Lapas Metro; Lapas Gunung Sugih; Lapas Kota Agung; dan Bapas Metro, kemudian terdapat 2 satuan kerja imigrasi : Kanim Bandar Lampung dan Kanim Kalianda.

Menutup sambutan, Edi Kurniadi mengingatkan para peserta yang hadir untuk menyerap setiap arahan yang akan disampaikan oleh Staf Ahli Bidang penguatan Reformasi Birokrasi dengan sungguh-sungguh sehingga Pembangunan Zona Integritas di masing-masing Satuan Kerja dalam berjalan dengan baik dan terarah

Penguatan Nilai-nilai Reformasi Birokrasi

Dalam penyampaian materinya Iwan Kurniawan menjelaskan tentang Implementasi Area Perubahan dalam Pembangunan

Zona Integritas. Iwan Kurniawan juga menyampaikan pentingnya Kedisiplinan dan Profesionalisme Pegawai dalam sebuah Organisasi. "Kinerja Pegawai diukur melalui Aplikasi Simpeg, jika sudah mengerjakan suatu hal/tugas maka jangan lupa untuk selalu mengisi jurnal harian. Kita harus selalu meningkatkan Kompetensi kita dalam bekerja termasuk dalam Jenjang Pendidikan demi Organisasi bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena itu semua yang akan berpengaruh pada Indeks Profesionalitas ASN."

Maka, untuk tercapainya Reformasi Birokrasi diperlukan untuk meningkatkan dan menyamakan persepsi antar seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM, semua yang dikerjakan tetap dalam satu frekuensi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Diperlukan juga untuk meningkatkan pengawasan, tidak boleh lagi ada kecurangan-kecurangan demi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari korupsi. Selain itu diperlukan juga inovasi dalam pelayanan publik. Sesuai tuntutan zaman dimana teknologi telah

”
Kalau Kita bicara tentang Zona Integritas, tentang kelengkapan data dukung, yang dinilai yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas, Kapabilitas Aktif, Maturitas SPIP yang di nilai/diukur oleh BPKP, Opini BPK atas laporan Keuangan, Indeks Kualitas Perencanaan, Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Indeks Pelayanan Publik

ujar Iwan

berkembang pesat, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Pada Sesi Akhir Iwan Kurniawan menjelaskan juga tentang Implementasi 8 Area Perubahan Dalam Pencapaian Target Kinerja Kemenkumham meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Ke-

bijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta apa saja yang menjadi parameter keberhasilannya. •



Resmi Buka Rakor Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah, Kakanwil Kemenkumham Lampung Harapkan Penerapan PMPJ Notaris yang Lebih Efektif

25/05



Usai melantik dan mengam-bil sumpah para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Masih bertempat di Ballroom Novotel Lampung, pada Rabu (25/5), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung, Edi Kurniadi, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto dan selaku ketua pelnyelenggara: Kepala

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha.

Dalam sambutannya usai membuka Rapat Koordinasi, Edi Kurniadi mengucapkan selamat kepada para anggota MPDN yang baru dilantik. Edi juga menyampaikan harapannya untuk segera berkoordinasi dan menyesuaikan dengan kepengurusan MPDN-nya, sehingga dapat segera melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris, Edi mengungkapkan maksud

dari penerapannya sebagai wujud peran aktif profesi Notaris.

“Penerapan PMPJ oleh Notaris dimaksudkan agar Notaris tidak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, dengan mengidentifikasi setiap orang yang akan menggunakan jasa Notaris. Selain itu, penerapan PMPJ juga merupakan wujud peran aktif Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membantu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.” Ungkap Edi.

Selanjutnya Edi menjelaskan tujuan dari Rapat Koordinasi hari ini sebagai wadah penguatan pemahaman kenotariatan sehingga notaris dapat melaksanakan tugas dan pengawasan penerapan PMPJ dengan baik.

"Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Majelis Pengawas Notaris di Provinsi Lampung mengenai penerapan PMPJ oleh Notaris, sehingga dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penerapan PMPJ oleh Notaris dengan baik. Selain itu akan dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan PMPJ oleh Notaris, sehingga kedepan penerapan PMPJ dapat dilaksanakan secara efektif oleh Notaris khususnya di Provinsi Lampung." Pungkas Edi.

Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan

Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha memberikan paparan terkait dengan Audit Kepatuhan terhadap Notaris dalam penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ dan Pelaporan PPATK Bagi Notaris, Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang berasal dari Dirjen Perdata AHU/Kantor Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) dengan Pengawasan Kepatuhan dapat dilakukan bersama-sama dengan PPATK.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Lampung Ikatan Notaris Indonesia, Zul April mengenai Pembinaan Terhadap Notaris Dalam Menerapkan PMPJ. Dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa Notaris yang melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.

Zul April menyinggung jika para Notaris memberikan jasa lain diluar tugas kenotariatan, maka terdapat beberapa konsekuensi seperti :

- a. Notaris dikategorikan sebagai Pihak Pelapor (Pasal 3 PP No. 43/2015)
- b. Wajib Registrasi Aplikasi GO AML (pasal 8 Perka PPATK No. 11/2016)
- c. Wajib Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (pasal 5 Perka PPATK No. 11/2016 & pasal 3 Permenkumham No. 9/1997)
- d. W a j i b M e n -



Pengawasan Kepatuhan atas penerapan PMPJ dilakukan untuk menilai dan/ atau memastikan kepatuhan notaris dalam memenuhi ketentuan PMPJ, didasarkan pada hasil pengujian dan penerapan PMPJ

ujar Alpius

yampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) (pasal 23 (1) UU No. 8/2010 dan pasal 8 (1) PP No. 43/2015)

Menutup kegiatan, Zul April mengingatkan kepada para notaris untuk selalu memegang prinsip profesionalitas dan menjaga batasan dalam tugas kenotariatan serta bekerja sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. •



Cerdas Hukum Sejak Dini, Kanwil Kemenkumham Lampung Ajak Siswa Siswi MTSN 2 Bandar Lampung Terapkan Anti Narkoba dan Anti Bullying

27/05



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui kegiatan penyuluhan hukum mengajak siswa-siswi MTS N 2 Bandar Lampung untuk bertindak cerdas hukum dan menerapkan budaya hukum dengan menghindari narkoba dan tidak melakukan perundungan / bullying kepada sesama pada hari ini, Jumat (27/05/2022).

Penyuluhan Hukum ini dilakukan oleh JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yaitu Nurka Lingga Murti, Mardhotillah,

Teti Fitriandari, Muharammah Istnaini, Rika Rizkya, dan Rika Berlianti.

Dilansir dari katadata, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bullying atau biasa perundungan adalah

”

perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.

tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung menekankan bahwa sebagai sesama siswa harus saling menyayangi dan tidak melakukan bullying antar sesama.

Selain itu, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung juga menjelaskan mengenai dampak pemakaian narkoba. Dimana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan pembangunan sehingga harus kita jaga jangan sampai terpapar narkoba.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan MTS N 2 Bandar Lampung. Penyuluhan Hukum ini akan dilakukan secara berkesinambungan Kanwil Kemenkumham Lampung kepada masyarakat untuk mendukung terciptanya masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum. Sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memiliki supremasi hukum. •



▲
Penyuluh Hukum Madya, Nurka Lingga Murti berikan penyuluhan hukum terkait perlindungan anak



▲
Penyuluh Hukum Muda, Rika Rizky berikan penyuluhan hukum terkait dampak penggunaan narkoba



Wujudkan Anggaran yang Mengacu Pada Indikator Kerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja, Kanwil Kumham Lampung Gelar Penyusunan Pagu Indikatif TA 2023

30/05 



Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 bagi seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi juga dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputran-to; Kepala Divisi Pemasarakatan,

Farid Junaedi; Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara; Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali; Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI, Arlisa Novirianton; Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan. Kegiatan yang berlangsung tanggal 30-31 Mei 2022 ini bertempat di



Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara  memberikan laporan kegiatan



Emersia Hotel, Bandar Lampung, Senin (30/05).

Kegiatan didahului dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara dengan menyampaikan Tujuan penyelenggaraan Supervisi Pagu Indikatif TA 2023 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yaitu Menyusun Anggaran yang mengacu pada indikator kerja, standar biaya dan evaluasi kerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai setelah para peserta mengikuti kegiatan Supervisi Pagu Indikatif TA 2023 adalah peserta dapat :

- a. Menjelaskan konsep pendekatan penganggaran;
- b. Merancang Rencana Aktivitas / penugasan;
- c. Memperhitungkan rencana kebutuhan barang dan jasa;
- d. Merancang TOR dan RAB;
- e. Menghasilkan Perkiraan Penarikan Kebutuhan;
- f. Melaksanakan Pengendalian

Aktivitas;

- g. Memahami dan menjelaskan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- h. Memahami dan menerangkan aplikasi RKA-K/L – DIPA.

Dilanjutkan oleh sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi mengingatkan para peserta yang hadir untuk memperhatikan kebutuhan riil melalui analisis kondisi obyektif satuan kerja masing-masing, serta pencapaian prestasi kerja tahun sebelumnya dengan perkiraan anggaran yang realistis, kesesuaian postur, mempertimbangkan perkiraan penambahan pegawai dan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi.

Perlu diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta merupakan pegawai dan pejabat yang menangani penyusunan Anggaran baik dari Satuan Kerja Pemasarakatan, Imigrasi dan Kantor Wilayah. Acara dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan pagu indikatif masing-masing satuan kerja yang didampingi oleh panitia dari Kantor Wilayah. •

”

Untuk itu diselenggarakan kegiatan ini yang merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

ujar Edi

EVALUASI TPI DALAM PEMBANGUNAN ZI

Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung

27 Mei - 3 Juni 2022 

Nantinya Tim Penilai Internal ini di bagi menjadi 2(dua) Tim untuk melakukan Evaluasi di beberapa Satker, dan jika ada pertanyaan dan diperlukannya diskusi dipersilahkan untuk bertanya secara langsung" imbuhnya. Topan juga berharap untuk semua

satker dapat masuk dalam kriteria WBK dan WBBM. Satker yang akan di Evaluasi berjumlah 15 dan Masing-masing TPI Inspektorat Jendral terdiri dari 5 Orang





Jelang Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM Oleh TPI, Kakanwil Edi Kurniadi: Mindset, Budaya Kerja, dan Pimpinan Sebagai Role Model Jadi Poin Utama



▲ Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan (kiri) sampaikan arahan terkait evaluasi pembangunan zona integritas

Penguatan Kakanwil

Melanjutkan hasil Rapat Persiapan Dalam rangka Kedatangan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ke Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Rabu (25/05/2022) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto dan 15 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran

”

Saya berharap para UPT di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung Tahun ini dapat meraih predikat WBK, namun perlu di garis bawahi bahwa bukan hanya predikat yang kita incar tetapi yang paling penting adalah mindset/pola pikir dan budaya kerja serta Pimpinan sebagai Role Model

—
pesan Edi

Kanwil Kemenkumham Lampung yang ditetapkan TPI mendapat usulan Predikat menuju WBK melaksanakan Rapat Persiapan yang bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas.

Dalam Rapat, Edi Kurniadi menyampaikan bahwa dalam arahan Sekretaris Jenderal para Kepala UPT yang telah diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus memulai segala pekerjaan dengan baik, benar dan tepat, termasuk dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Edi Kurniadi berharap semangat yang ada di UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung untuk mengikuti kontestasi terus memacu hingga ke jajaran di masing-masing UPT.

Entry Meeting

Jum'at (27/05/2022)
Seluruh Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ikuti Entry Meeting untuk Persiapan Evaluasi TPI Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung.

Entry Meeting yang bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kanwil Lampung ini diadakan secara virtual/zoom dan dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Topan Sapuan; Perwakilan dari seluruh pokja, dan Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jendral.

Entry Meeting ini dibuka langsung oleh Topan Sapuan, dalam sambutannya Topan menjelaskan tujuan dari Rapat ini adalah untuk melakukan sosialisasi

terkait Zona Integritas secara luas dan persiapan dalam melakukan Penilaian ZI yang mengacu kepada PerMenPan Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

"Nantinya Tim Penilai Internal ini di bagi menjadi 2(dua) Tim untuk melakukan Evaluasi di beberapa Satker, dan jika ada pertanyaan dan diperlukannya diskusi dipersilahkan untuk bertanya secara langsung" imbuhnya. Topan juga berharap untuk semua satker dapat masuk dalam kriteria WBK dan WBBM.

Satker yang akan di Evaluasi berjumlah 15 dan Masing-masing TPI Inspektorat Jendral terdiri dari 5 Orang. Satker tersebut terdiri dari:

1. Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung
2. Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
4. Lembaga Pemasarakatan

- Kelas I Bandar Lampung
5. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi
6. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung
7. Rumah Tahanan Negara Kelas I Kotabumi
8. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Metro
9. Balai Pemasarakatan Kelas II Metro
10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda
11. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
12. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kotaagung
13. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung
14. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotaagung
15. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Metro

Dalam Entry Meeting Persiapan ini paparan dan sambutan dari perwakilan TPI di bawakan oleh M Rusli Basri. Rusli menjelaskan tentang beberapa point yaitu terkait Perubahan Kebijakan Zona Integritas, Kerangka Logis Pembangunan Zona Integritas, Aspek Pemenuhan/Reform dan Penilaian Berjenjang



Terima BA Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK 7 Satker Oleh TPI

Setelah menyelesaikan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 7 (tujuh) Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Jum'at (03/06/2022) Rombongan 1 Tim Penilai Internal (TPI) menyerahkan secara langsung Berita Acara Evaluasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan.

TPI yang dibawah Pengendali Teknis, M Rusli B dan diketuai oleh Edy Prabowo Saputro serta 3 (tiga) anggota lainnya antara lain Hendra Anggara Saputra, Hardika Pratama Putra serta Fera Arindra Tri Anestyia melakukan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK pada 7 (tujuh) Satker Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung antara lain Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, dan Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung.

Bertempat di Ruangannya Kantorwil Kemenkumham Lampung, Rusli menyampaikan bahwa hasil dari Evaluasi kepada 7 (tujuh) Satker di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung memiliki hasil yang baik dan memuaskan.

Selanjutnya Rusli menyampaikan bahwa kekurangan data dukung dalam penguploadan di Aplikasi E-RB menjadi suatu kend-



Penyerahan berita acara evaluasi Tim Penilai Internal langsung kepada Kakanwil Edi Kurniadi



Saya melihat semangat kawan-kawan Satuan Kerja di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung sangat tinggi dan sangat antusias

ucap Rusli

ala dan permasalahan dalam Evaluasi TPI Namun demikian Sarana dan Prasarana serta inovasi yang dibangun oleh masing-masing Satuan Kerja dinilai telah memadai.

Menanggapi hal itu, Edi Kurniadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan TPI selama 10 hari, dimana secara berkelanjutan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 7 (tujuh) Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Edi juga menyampaikan

bahwa Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung dianggap bisa meraih predikat WBK, karena menurut Edi Predikat WBK sejatinya berada di dalam pola pikir/mindset, role model pimpinan, serta meningkatnya pelayanan publik.

“Saya berharap di Tahun ini terdapat Satuan Kerja di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung yang dapat meraih Predikat WBK” Tegus Edi. •

Tindak lanjut Penyampaian Aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan



Selasa (07/06/22), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung kedatangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu beserta rombongan, Selasa (07/06). Kedatangan kali ini merupakan lanjutan kerjasama yang sudah terjalin antara Kanwil Kemenkumham Lampung dan Kanwil DJKN Lampung & Bengkulu. Maksud kedatangan tidak lain adalah untuk bersilaturahmi serta melakukan koordinasi bersama Kanwil Ke-

◀ Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi bersama Kakanwil DJKN Lampung Dudung Rudi Hendratna

menkumham Lampung.

Kunjungan pertama Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Dudung Rudi Hendratna ke Kanwil Kemenkumham Lampung sejak dilantik sebagai Kepala Kanwil DJKN Lampung Bengkulu pada 13 April 2022 disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi. Silaturahmi dan koordinasi berlangsung di ruang Kakanwil Kemenkumham Lampung yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha Hidayat.

Kedatangan Tim DJKN Lampung Bengkulu ke Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk menindaklanjuti penyampaian aset BLBI dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya pada tanggal (09/06) Kamis Tim yang dikepalai kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama beserta tim dari Biro BMN akan meninjau langsung lahan aset BLBI.

”

Terimakasih kepada Kanwil DJKN yang telah mengapresiasi jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, dengan terus berjalannya kerjasama ini, maka jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung akan terus semangat dalam pengelolaan BMN yang tertib administrasi. Untuk itu kita terus saling berkoordinasi jika ada kendala-kendala yang timbul

—
kata Edi

Edi kurniadi menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh jajaran DJKN Lampung Bengkulu yang telah membantu dan mendukung Kanwil Kemenkumham Lampung.

"Terimakasih kepada Kanwil DJKN yang telah mengapresiasi jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, dengan terus berjalannya kerjasama ini, maka jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung akan terus semangat dalam pengelolaan BMN yang tertib administrasi. Untuk itu kita terus saling

berkoordinasi jika ada kendala-kendala yang timbul", ucap Edi. Pertemuan singkat tersebut diakhiri dengan foto bersama antara pejabat Kemenkumham Lampung dan DJKN Lampung Bengkulu yang hadir.

Karo Hukerma Tinjau Langsung Lokasi Eks Aset BLBI

Menindaklanjuti Penyampaian eks Aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan. Rabu (08/06/2022) Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melakukan Penelitian lapangan dan koordinasi di Wilayah Provinsi Lampung.

◀ karo Hukerma, Hantor Situmorang (kanan) saat meninjau langsung eks aset BLBI





Tim yang diketuai oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama: Hantor Situmorang bersama dengan Kepala Bagian Perencanaan BMN dan TU Biro BMN: Heny Widyawati, Analisis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan BMN: Nancy Hasiani, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda: Euis Priyani Suhendro, Pengolah Data Evaluasi dan Informasi: Reza Ikhwan Purnama dan Analisis Hukum: Rifky Ardian Nugroho melakukan koordinasi bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Lampung telah melakukan koordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung-Bengkulu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro terkait dengan 5 (lima) bidang tanah asset property BLBI di Wilayah Lampung yang diusulkan pembangunan Lembaga Pemas-yarkatan. 4 (empat) bidang tanah

yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung dan 1 (satu) bidang tanah yang berada dalam wilayah KPKNL Metro.

Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan bersama dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Arya Dwi Jayanti beserta rombongan turut mengawal kegiatan peninjauan tanah eks Aset BLBI. Titik pertama pada Lokasi Sukatani, Kalianda, Topan menyampaikan bahwa kondisi luas tanah 42.600 telah tersertifikat SHM namun demikian kondisi tanah terbelah menjadi 2 (dua) bagian yang terbelah oleh Jalan Tol Trans Sumatera. Beberapa keberadaan seperti air bersih juga menjadi kendala pembangunan di lokasi Sukatani.

“Jarak keberadaan Kantor Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki jarak kurang lebih 10 Kilometer” Ucap Topan menjelaskan

Selanjutnya pada Titik Kedua pada Lokasi Way Panji, Lampung Selatan, Topan juga menjelaskan kendala terkait den-

gan ketersediaan air bersih, sumber listrik, jarak pemadam kebakaran dan juga fasilitas Kesehatan.

“Kondisinya merupakan areal persawahan tadah hujan, yang menjadikan potensi kerawanan bencana banjir” Ujar Topan

Berlanjut pada titik ketiga pada lokasi Panjang, Bandar Lampung, Hantor Situmorang bersama dengan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Dudung Rudi Hendratna menyampaikan bahwa melihat titik lokasi memungkinkan untuk melakukan peninjauan lebih jauh. Namun demikian, potensi kerawanan bencana kebakaran dapat terjadi dikarenakan lokasi dekat dengan pemukiman padat penduduk, pasar dan pusat perbelanjaan.

“Selanjutnya, saya akan berkoordinasi atas hasil tinjauan hari ini, bagaimana situasi dan kondisinya” Ucap Hantor kepada Kakanwil DJKN Lampung-Bengkulu. •

**Penyelenggaraan SKD
Seleksi Kompetensi Dasar Calon
Taruna Poltekip/Poltekim TA. 2022
Kanwil Kemenkumham Lampung**



20-25 Juni 2022



Dalam Rangka Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/ (Catar) Politeknik Ilmu Pemasaran (Poltekip)/ Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2022. Senin (20/06/2022) Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi Bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto, Plt. Kepala Bagian Umum, Basnamara, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia melakukan pengawasan langsung Kegiatan SKD.



Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Taruna Poltekip/Poltekim TA. 2022 Kanwil Kemenkumham Lampung

Kegiatan SKD yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawain Negara (BKN) Kantor Regional V Bandar Lampung, sebanyak 150 orang peserta yang terbagi sebanyak 3 (tiga) sesi rencananya akan mengikuti jalannya tes pada hari ini. Kakanwil beserta rombongan disambut secara langsung oleh Plt. Kanreg V UPT BKN Bandar Lampung, Wijaya Kesuma.

Kakanwil menyampaikan Panitia Kanwil Kemenkumham Lampung siap un-

tuk memfasilitasi dan membantu jalannya Kegiatan SKD Catar Poltekip dan Poltekim dengan bersinergi dengan Panitia Pusat maupun Panitia BKN. Kakanwil menegaskan diharapkan dengan kolaborasi dan sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM Bersama dengan BKN akan menciptakan situasi yang tertib, aman, dan lancar serta menjaga transparansi jalannya SKD.

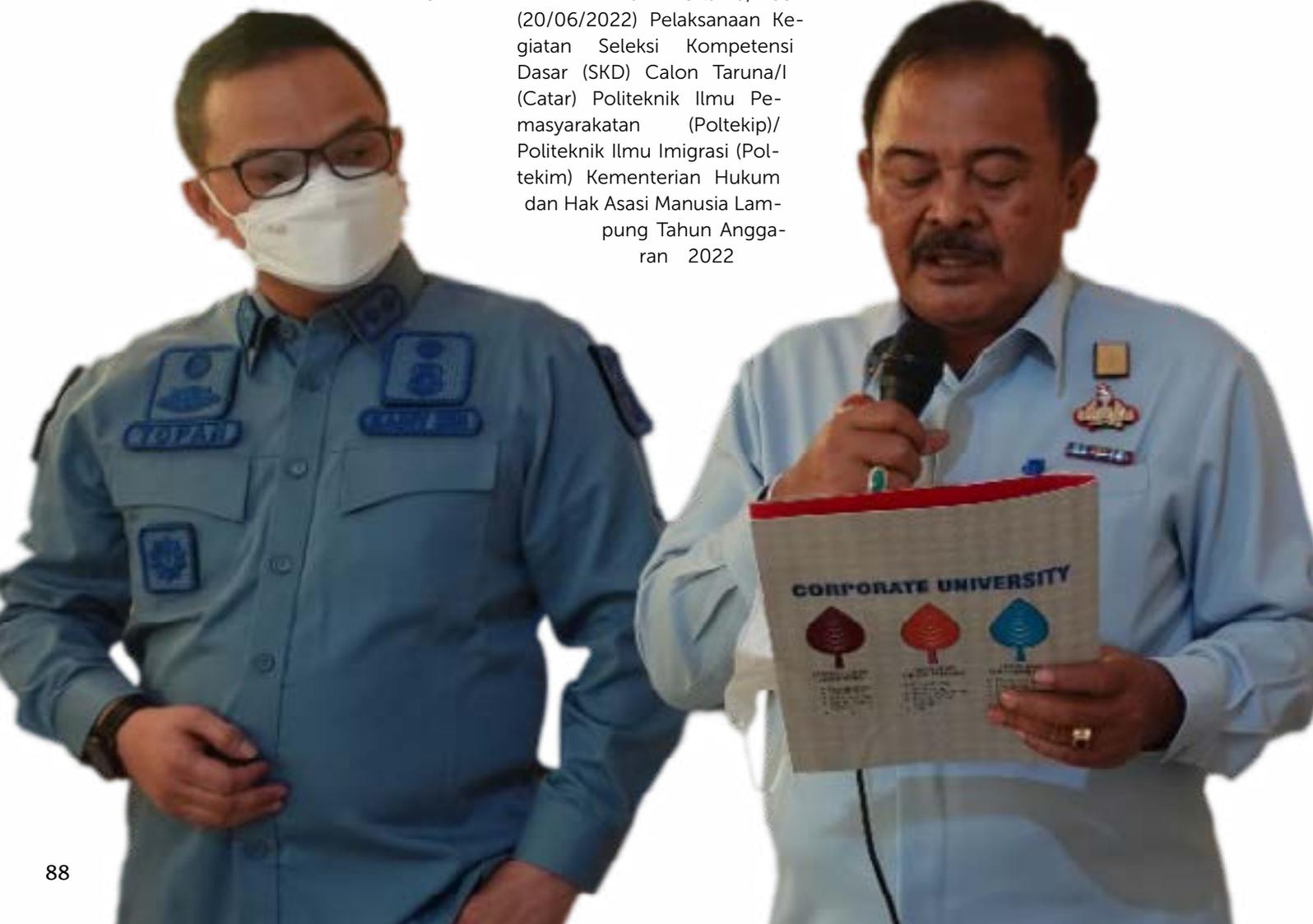
Arahan Kakanwil pada Peserta Catar

Di hari Pertama, Senin (20/06/2022) Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/I (Catar) Politeknik Ilmu Pemasaran (Poltekip)/ Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2022

”

Saya mengingatkan kepada para peserta agar selalu Waspada, Teliti, dan Percaya Diri

tegas Edi





Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Catat saksikan pembukaan segel ruangan oleh panitia ▲

Kepegawaian selaku Ketua Panitia Seleksi kepada para peserta ujian.

Hal ini ditambahkan dengan agar selalu waspada kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dan juga terhadap informasi-informasi yang bukan berasal dari Website resmi Kementerian Hukum dan HAM.

“Teliti dalam mengerjakan soal dan percaya diri dengan pelaksanaan ujian” Ujar Edi

“Tiada yang bisa membantu saudara-saudara/rekan-rekan/adik-adik sekalian kecuali diri sendiri” Tegasnya.

yang bertempat di UPT BKN Regional V, Bandar Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi Bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto, Plt. Kepala Bagian

Umum, Basnamara, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia melakukan pengawasan langsung Kegiatan SKD.

Sebelum memasuki ruangan Tes, Para peserta diwajibkan untuk melakukan scan peduli lindungi, pengukuran suhu tubuh, pengecekan identitas, pemberian pin ujian, penitipan barang, memasuki area steril dan penayangan video arahan, dan pengecekan badan. Memasuki Area Tunggu Ruang Steril, Edi Kurniadi memberikan Arahan Kepala Biro

Sebagai Informasi, sebanyak 43 peserta dari 50 orang peserta yang hadir pada sesi pertama pada hari ini, dimana pada hari ini juga digelar sebanyak III Sesi untuk 150 orang peserta.



Irwil III Tinjau Pelaksanaan Catat

– Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Iwan Santoso meninjau secara langsung pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/I (Catat) Politeknik Ilmu Pemasaran (Poltekkip)/ Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2022. Senin (20/06/2022)

Bertempat di Kanreg V UPT BKN, Bandar Lampung, Kedatangan Iwan Santoso disambut secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto, Plt. Kepala Bagian Umum, Basnamara, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia. Dalam kedatangannya Iwan Santoso melihat situasi kondisi pada Area Pelaksanaan SKD dan memonitoring Kegiatan SKD secara langsung.

Iwan Santoso menyampaikan walaupun kegiatan SKD Penerimaan Catat Poltekkip/Poltekim di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dilakukan secara tahunan, panitia tetap harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Di Ruang Tes SKD, Iwan Santoso mengingatkan kepada para peserta, bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus selalu diingat untuk lolos dalam SKD.

”

Kelulusan itu hanya membutuhkan 3 (tiga) hal yaitu Usaha Diri Sendiri, Pertolongan Allah SWT, dan Doa Orang Tua

ucap Iwan

“Saya mengingatkan kepada para peserta akan 3 (tiga) hal”
Ucap Iwan

“Kelulusan itu hanya membutuhkan 3 (tiga) hal yaitu Usaha Diri Sendiri, Pertolongan Allah SWT, dan Doa Orang Tua” Lanjut Iwan

Selain itu Iwan juga menegaskan agar seluruh peserta jangan percaya kepada siapapun yang menawarkan dapat memberikan kelulusan.

Sebagai Informasi, Pada hari pertama ini sebanyak 133 peserta hadir dari 150 orang peserta, Antara lain Sesi II: 43 Peserta dengan Nilai Tertinggi 446, Sesi III: 45 peserta dengan nilai tertinggi 428, dan Sesi IV: 45 peserta dengan nilai tertinggi: 456.

Hasil SKD Terantau Secara Transparan dan Real Time

Pada Selasa (21/6), bertempat di Unit Pelaksana



Pengecekan suhu badan dan pemeriksaan metal detector oleh panitia ▶



Adapun ketentuan lain yang berlaku ketika peserta memasuki Ruang CAT adalah sebagai berikut: peserta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang formal berwarna hitam tanpa mengenakan ikat pinggang, dan sepatu formal berwarna hitam. Peserta tidak diperkenankan membawa barang-barang yang tidak esensial terhadap pelaksanaan ujian, barang bawaan yang tidak boleh dibawa ke dalam Ruang CAT wajib disimpan pada loker yang disediakan panitia. Peserta hanya akan membawa kartu ujian, KTP dan kunci loker saja.

Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung, memasuki hari kedua pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM RI, Politeknik Ilmu Pemasaran (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Selaku penyelenggara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada hari kedua pelaksanaan SKD akan menangani tak lebih dari 200 orang peserta yang terbagi ke dalam 4 sesi ujian. Tentunya pelaksanaan SKD

matuhi protokol kesehatan.

Jenis SKD yang dilaksanakan merupakan ujian dengan bantuan komputer atas Computer Assisted Test (CAT) sehingga peserta hanya diperkenankan membawa pensil untuk menulis penghitungan pada kertas buram yang dibagikan oleh panitia.

Pelaksanaan SKD Catur Poltekim dan Poltekim Wilayah Lampung merupakan kegiatan seleksi sekolah kedinasan yang melibatkan beragam instansi yang saling berkoordinasi di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Badan Kepegawaian





”

*Yang penting
Para Panitia tidak
lengah terhadap
pelaksanaan
SKD ini*

pesan Ida

Daerah Lampung, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Sebagai pengantar, Plt. Kepala UPT BKN Bandar Lampung, Wijaya Kesuma, mengungkapkan bahwa soal-soal yang dijawab oleh peserta rentang waktu yang ketat akan tersimpan dan hasilnya terpantau secara transparan dan real-time, sehingga peserta dihimbau untuk fokus mengerjakan pekerjaannya sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Wijaya juga memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki keberatan terhadap rangkaian proses seleksi untuk menyampaikan keberatannya secara deokratis, dengan

cara-cara yang elegan dan beradab.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Kanwil Kemenkumham Lampung, Yulinar turut mengantarkan para peserta dengan memberi semangat. Yulinar berpesan kepada para peserta untuk fokus dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan seleksi kompetensi dasar ini, dan apapun hasilnya jangan berputus asa dan berkecil hati yang terpenting percaya pada kemampuan diri sendiri.

Pihak BSSN turut hadir sebagai pihak yang mengawasi keamanan siber dalam ujian yang menggunakan jaringan internet dalam penerapannya. Pi-

hak BSSN akan memastikan tidak ada sistem maupun jaringan yang terkompromi yang dapat menjadi celah terjadinya peretasan dan kebocoran data.

Karoren Tinjau Situasi SKD Catur

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ida Asep Somara melakukan peninjauan situasi dan kondisi ter-



kait dengan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/I (Catar) Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip)/ Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2022 yang memasuki Hari Kedua digelar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandar Lampung. Selasa (21/06/2022)

Dalam peninjauannya, Ida Asep Somara yang disambut oleh Plt. Kepala Bagian Umum, Basnamara dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia serta Plt. Kepala Kantor Regional V BKN, Wijaya Kesuma melakukan cek situasi ruangan pelaksanaan SKD. Ida menyampaikan pada Panitia Pusat dan Panitia Daerah Jajaran Kemenkumham agar menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Ida juga menyampaikan bahwa selama ini Provinsi Lampung merupakan peminat terbanyak dari pendaftar Sekolah Kedinasan, untuk itu semakin tinggi pendaftar

maka resiko akan permasalahan Kegiatan SKD pun seiring akan meningkat.

Berharap Terseleksi Calon Taruna/i Unggul

Hari terakhir pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/I (Catar) Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip)/ Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun Anggaran 2022 berjalan tertib, aman, dan transparan.

Seperti pada sesi awal di hari pelaksanaan sebelumnya, SKD diawali dengan pembukaan segel Ruang CAT oleh panitia dan disaksikan oleh perwakilan peserta seleksi.

Sebelum memasuki ruangan Tes, tentunya pelaksanaan SKD tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Para peserta diwajibkan untuk melakukan Scan Peduli Lindungi, Pengukuran

Suhu Tubuh, Pengecekan Identitas, Pemberian Pin Ujian, Penitipan Barang, Memasuki Area Steril dan Penayangan Video Arahkan serta Pengecekan Badan.

Menunggu dimulainya tes CAT, seluruh peserta memasuki Area Tunggu Ruang Steril, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia dan Plt. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wijaya Kesuma memberikan beberapa arahan kepada para peserta.

"Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan SKD, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri, berusaha semaksimal mungkin, dan selalu berdoa kepada Tuhan YME agar dapat lolos ke seleksi selanjutnya" ujar Yulinar.

menambahkan arahan, "Para peserta harus fokus dalam pelaksanaan ujian, maksimalkan waktu yang ada dan jangan tergesa-gesa" Ucapan Wijaya Kesuma. •



Plt. Kabag Umum, Basnamara menerima berita acara pelaksanaan SKD Catar

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



PELAPORAN

- Masyarakat mengirimkan laporan melalui laman **<https://www.lapor.go.id>** / atau **SMS 1708** format Kumham (spasi) Aduan **dan Aplikasi Mobile**
- Laporan **diverifikasi oleh Administrator LAPOR!** untuk kejelasan dan kelengkapan
- **Diteruskan ke Unit/Kanwil/UPT oleh Admin Instansi** paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan

TINDAKLANJUT PELAPORAN

- **Mempublikasikan setiap laporan** yang telah di disposisi **kepada Pelapor**
- **Sistem Memberikan notifikasi** kepada pelapor
- Instansi Unit/Kanwil/UPT diberikan waktu 5 hari kerja untuk **Melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut laporan**
- Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut **pelapor dapat memperoleh informasi di halaman tindak lanjut**



PENUTUPAN PELAPORAN

- Laporan dianggap selesai jika sudah ada **tindak lanjut dari Instansi Unit Utama, Kanwil dan UPT**
- Diberikan **waktu 10 hari kerja dari tindak lanjut laporan**, jika tidak ada sanggahan dari pelapor di halaman tindak lanjut laporan



Tetap Berkreasi Meski di Balik Jeruji Besi

Yuk mengenal pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di beberapa Lapas jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Pembinaan kemandirian tak hanya bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kegiatan ini juga sebagai persiapan mereka ketika berbaur ketengah masyarakat usai menjalani pembinaan.

WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan (Andikpas), dan klien pemasyarakatan



*Narapidana
jadi Barista*



Raja Bakery

Lapas Kelas I Bandar Lampung



Wamenkumham RI mencoba roti "Raja Bakery" buatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas I Bandar Lampung



Saya melihat kegiatan pembinaan Lapas Kelas I Bandar Lampung, dan mencoba roti buatan WBP, rasanya luar biasa enak. Semoga keahlian ini dapat ditingkatkan untuk bekal WBP nanti ketika diluar.

Edward O.S. Hiariej
Wamenkumham RI

Barista

Lapas Kelas IIA Metro



Antusiasme Warga Binaan Lapas Metro Ikuti Pelatihan Kemandirian Barista Kopi



Warga binaan setelah selesai pelatihan dapat benar benar memahami cara kerja seorang barista kopi, agar saat bebas dapat berkreasi dibalik nikmatnya secangkir kopi. Segala upaya tentu kami lakukan untuk membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat.

Muchamad Mulyana
Kalapas Kelas IIA Metro

Kain Tapis

Lapas Perempuan Kelas IIA
Bandar Lampung



Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana melihat proses produksi Kain Tapis Warga Binaan Pemasyarakatan



Kami tidak hanya mengajarkan dasar-dasar sulam tapis, namun juga memberikan pelatihan aneka handycraft yang dapat dihasilkan dari sulam tapis modern, dan Warga Binaan di Lapas Perempuan ini dapat menerima dengan baik materi-materi yang diberikan oleh kami.

Haniah Anwar
Instruktur dari Adian Tapis

Mebel

LPKA Bandar Lampung



Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Bandar Lampung saat mengikuti kegiatan pelatihan mebel



Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bekal ilmu keterampilan mebel kepada Andikpas agar dapat kembali lagi ke lingkungan masyarakat. Semoga peserta mendapatkan ilmu dan kembali ke masyarakat dengan bekal Pelatihan Mebel yang telah diperoleh.

Sambiyu
Kepala LPKA Bandar Lampung

Handicraft

Lapas Kelas IIA Kalianda



Patung dan miniatur Karya WBP Lapas Kalianda dilihat langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto



Dengan membawa hasil karya Warga Binaan ke Event Pesta Rakyat, diharapkan mampu mensosialisasikan kegiatan Warga Binaan kepada masyarakat umum, sekaligus menambah nilai ekonomis hasil kerajinan Warga Binaan Lapas Kalianda.

Tetra Destorie Imantoro
Kalapas Kelas IIA Kalianda

Pertanian

Lapas Khusus Narkotika
Kelas IIA Bandar Lampung



Panen sawi dan kangkung di Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung



Melihat keberhasilan ini, pengelolaan lahan pertanian akan berkelanjutan. Bukan hanya satu jenis sayuran, melainkan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi. Sebagaimana kita lihat warga binaan ini bisa mandiri memiliki kemampuan yang akan mereka bawa ketika bebas nanti.

Porman Siregar
Kalapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Perikanan

Lapas Kelas IIB Way Kanan



Pelatihan Kemandirian Budidaya Ikan Nila di Lapas Kelas IIB Way Kanan



Jadikan pelatihan ini sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu berwirausaha yang baik dan nantinya dijadikan peluang usaha di sektor perikanan serta meningkatkan keahlian. Diharapkan setelah bebas dari Lapas kalian sudah memiliki keahlian yang bisa dijadikan bekal untuk menyambung hidup.

Syarpani
Kalapas Kelas IIB Gunung Sugih



Upaya peningkatan kualitas program pembinaan kemandirian dari waktu ke waktu terus dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya dengan melakukan asesmen kepada WBP yang akan dilatih dan dipekerjakan pada bengkel kerja dan produksi WBP



Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK)

Ayo Tingkatkan Penjualan Produkmu!

Dengan mendaftarkannya pada *Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham*

↑
Gratis loh

Aksi Afirmasi PDN

Presiden telah menginstruksikan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui Aksi Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN

Aksi Afirmasi tersebut ditandai dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral bagi pelaku UMKK.



Apa itu E-Catalog?

E-catalog atau biasa disebut dengan katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, merk, jenis, spesifikasi teknik, harga sampai jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia (supplier). E-catalog mempunyai tampilan yang hampir sama dengan e-commerce yang biasa anda gunakan dalam berbelanja online, namun bedanya adalah barang atau jasa yang diperjual belikan merupakan kebutuhan pemerintah atau perusahaan tempat anda bekerja.

Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian



Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham



1 Etalase Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi: Makanan dan Minuman Deteni, Makanan dan Minuman Peserta Diklat serta Makanan dan Minuman Taruna/Taruni



4 Etalase Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



2 Etalase Pakaian Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi: Atribut, Pakaian Dinas Taruna dan Sepatu



5 Etalase Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



3 Etalase Sarana dan Prasarana UPT Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi: Matras serta Peralatan Makan dan Minum;



6 Etalase Produk Sandang Tahanan/Narapidana/ Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yuk daftarkan UMKK-mu Sekarang!

Kami akan melakukan pendampingan memudahkan pelaku UMKK mendaftarkan produk usahanya pada Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Hukum dan HAM. Pendampingan pendaftaran Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tidak Dikenakan Biaya (Rp.0,- / GRATIS).



Jadwal

3 s.d. 12 Agustus 2022
pada hari kerja



Tempat

Ruang Pelayanan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Lampung



Narahubung

Yasir 082287896539
Baim 085877213809

e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman

yuk kunjungi website-nya ↗





7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

”

Ketika kita berbicara mengenai Zona Integritas, ada tiga kata kunci yang harus kita pegang bersama, harus kita hayati dan harus kita amalkan. Yang pertama dan utama adalah Integritas itu sendiri, yang kedua adalah transparansi dan yang ketiga ialah akuntabilitas. Di dalam integritas itu ada tiga hal yaitu kejujuran, kedisiplinan dan etika kita dalam melaksanakan tugas.

Edward O.S. Hiariej
Wamenkumham RI

